

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN *HUMAN DEVELOPMENT INDEX* DI  
JAWA TENGAH TAHUN 2018 - 2021**



**SKRIPSI**

Oleh:

Salsabila Nadhifa Nur Utariffa

19312018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN *HUMAN DEVELOPMENT INDEX* DI  
JAWA TENGAH TAHUN 2018 - 2021**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat  
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Salsabila Nadhifa Nur Utariffa

No. Mahasiswa : 19312018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 10 Februari 2023

Penulis.



(Salsabila Nadhifa Nur Utariffa)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN *HUMAN DEVELOPMENT INDEX* DI  
JAWA TENGAH TAHUN 2018 - 2021**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Salsabila Nadhifa Nur Utariffa

No. Mahasiswa : 19312018

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 8 Februari 2023

Dosen Pembimbing,



(Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Human Development Index di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2021

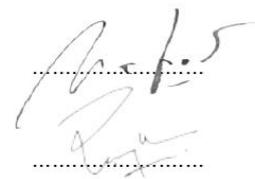
Disusun oleh : SALSABILA NADHIFA NUR UTARIFFA

Nomor Mahasiswa : 19312018

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Selasa, 07 Maret 2023

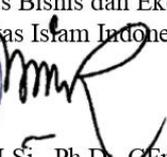
Penguji/Pembimbing Skripsi : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Penguji : Sigit Pamungkas, SE., M.Com.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

## MOTTO

*“... Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan),  
niscaya Allah akan mencukupkan mereka.”*

*(Q.S. At-Talaq: 3)*



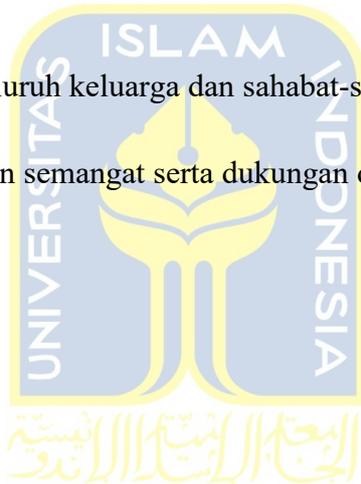
## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tua ku tersayang, **Bapak Heri Prasetya** dan **Ibu Fifti Efendi** yang tidak henti memberi kasih sayang dengan penuh ketulusan, dukungan, doa, serta semangat sehingga aku mampu menyelesaikan studi dengan lancar.

Seluruh keluarga dan sahabat-sahabatku,

Yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahillobbil'alamin*, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan *Human Development Index* di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2021”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak beliau dan memperoleh syafaat-Nya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Heri Prasetya dan Ibu Fifti Efendi selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendukung, membimbing, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam segala hal hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran dan nasihat kepada penulis,

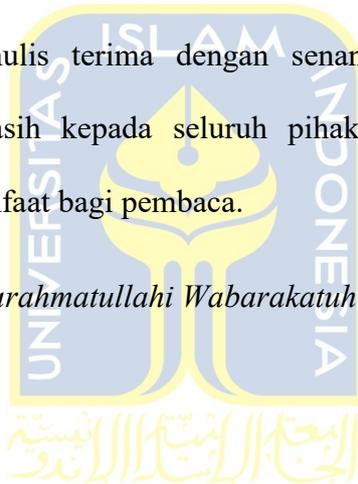
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta atas ilmu yang diberikan semoga dapat terus bermanfaat di kemudian hari.

3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu, pelajaran, dan pengalaman yang sangat berharga.
7. Muhammad Farhan Fedhitama, selaku kakak penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
8. Saniya Salsabila dan Nadia Miftakhulhusna Aiza yang selalu mendengarkan keluh kesah dan menemani penulis dalam setiap perjalanan serta kesulitan yang dihadapi.
9. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan dan penyusunan tugas akhir Vania, Saphira, Feren, dan Annia yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

10. Teman-temanku tersayang Nahdya, Widia, Regita, Tadzqiya, Tara, Winda, Salma, Ami, Melan, dan Innes yang telah membantu penulis dalam berbagai aspek.
11. Akuntansi 19 serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati, Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas dukungannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

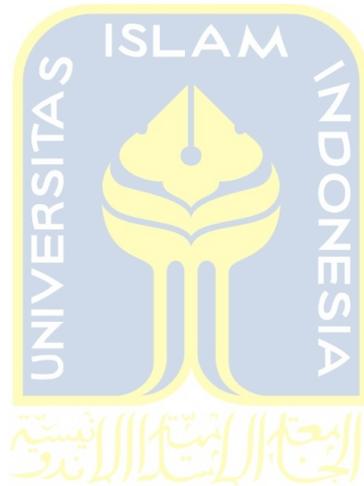
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Yogyakarta, 8 Februari 2023

Penulis,

Salsabila Nadhifa Nur Utariffa



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi .....	v
Halaman Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar .....	xvi
Daftar Lampiran .....	xvii
Abstrak .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	1
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Teori Federalisme Fiskal ( <i>Fiscal Federalism Theory</i> ) .....	13
2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah .....	14
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi .....	19
2.1.4 <i>Human Development Index</i> .....	20
2.2 Penelitian Terdahulu .....	23
2.3 Hipotesis Penelitian .....	28
2.3.1 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	29
2.3.2 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap <i>Human Development Index</i> .....	31

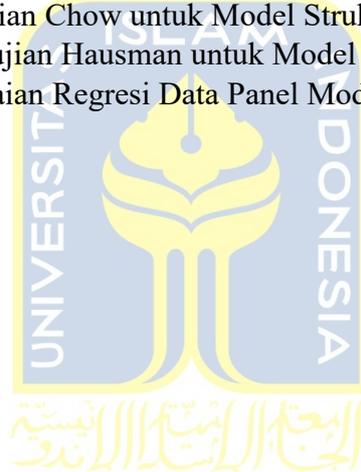
2.3.3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap <i>Human Development Index</i> .....	32
2.4	Kerangka Konseptual .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>35</b>
3.1	Populasi dan Sampel .....	35
3.2	Metode Pengumpulan Data .....	36
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel penelitian .....	37
3.3.1	Variabel Independen .....	37
3.3.2	Variabel Mediasi .....	40
3.3.3	Variabel Dependen .....	41
3.4	Metode Analisis Data .....	42
3.4.1	Analisis Deskriptif .....	43
3.4.2	Analisis Regresi Data Panel .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>52</b>
4.1	Deskripsi Data Penelitian .....	52
4.2	Hasil Analisis Data .....	53
4.2.1	Analisis Deskriptif .....	53
4.2.2	Pengujian Asumsi Klasik .....	56
4.2.3	Analisis Regresi Data Panel .....	60
4.2.4	Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ) .....	73
4.3	Pembahasan Uji Hipotesis .....	75
4.3.1	Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	75
4.3.2	Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	77
4.3.3	Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	78
4.3.4	Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap <i>Human Development Index</i> .....	79
4.3.5	Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap <i>Human Development Index</i> .....	81
4.3.6	Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Belanja terhadap <i>Human Development Index</i> .....	82

4.3.7	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap <i>Human Development</i>	
<i>Index</i>	.....	83
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	85
5.1	Kesimpulan .....	85
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	87
5.3	Implikasi Hasil Penelitian .....	87
5.4	Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	90
<b>LAMPIRAN</b>	.....	95



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3. 1 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal .....	38
Tabel 3. 2 Kriteria Kemampuan Efektivitas Daerah .....	39
Tabel 3. 3 Kategori Human Development Index (HDI) .....	42
Tabel 4. 1 Data Sampel .....	53
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	54
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas .....	57
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	58
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi .....	59
Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Chow untuk Model Struktural (1) .....	61
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Hausman untuk Model Struktural (1) .....	62
Tabel 4. 8 Hasil Penilaian Regresi Data Panel Model Struktural (1) .....	63
Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Chow untuk Model Struktural (2) .....	67
Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Hausman untuk Model Struktural (2) .....	68
Tabel 4. 11 Hasil Penilaian Regresi Data Panel Model Struktural (2) .....	69



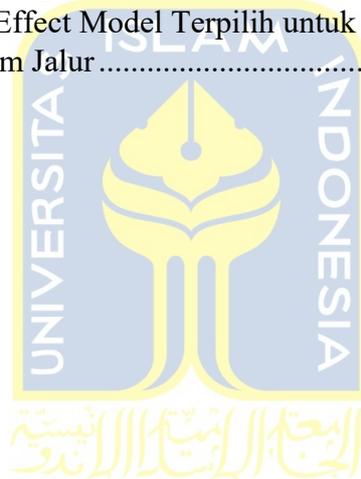
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	34
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas .....	57
Gambar 4. 2 Diagram Jalur Hubungan Kausal Variabel Independen, Variabel Mediasi, dan Variabel Dependen .....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah .....	96
LAMPIRAN 2 Rekapitulasi Data Penelitian .....	97
LAMPIRAN 3 Hasil Analisis Deskriptif .....	100
LAMPIRAN 4 Hasil Uji Normalitas .....	101
LAMPIRAN 5 Hasil Uji Multikolinearitas .....	101
LAMPIRAN 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	101
LAMPIRAN 7 Hasil Uji Autokorelasi .....	102
LAMPIRAN 8 Hasil Pengujian Chow untuk Model Struktural (1) .....	102
LAMPIRAN 9 Hasil Pengujian Hausman untuk Model Struktural (1) .....	102
LAMPIRAN 10 Fixed Effect Model Terpilih untuk Model Struktural (1) .....	103
LAMPIRAN 11 Hasil Pengujian Chow untuk Model Struktural (2) .....	104
LAMPIRAN 12 Hasil Pengujian Hausman untuk Model Struktural (2) .....	104
LAMPIRAN 13 Fixed Effect Model Terpilih untuk Model Struktural (2) .....	105
LAMPIRAN 14 Diagram Jalur .....	106



## ABSTRAK

Alokasi keuangan secara tepat oleh pemerintah dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan *Human Development Index* di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018-2021. Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* dan analisis jalur (*path analysis*). Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan rasio belanja berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio belanja berpengaruh positif signifikan terhadap HDI, sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap HDI. Sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap HDI. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memediasi rasio belanja terhadap HDI, tetapi tidak mampu memediasi antara rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas terhadap HDI.

**Kata Kunci:** kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, *Human Development Index* (HDI)

## ABSTRACT

*Appropriate financial allocation by the government can improve the economy and regional development, which in turn has an impact on improving people's welfare. The purpose of this research is to analyze the effect of financial performance such as fiscal decentralization ratio, effectiveness ratio, and expenditure ratio on economic growth and the Human Development Index in 35 cities in Central Java in 2018-2021. The analytical methods in this research uses a panel data regression model with the Fixed Effects Model approach and path analysis. The result of this research indicates that the financial performance such as the fiscal decentralization ratio has no significant effect on economic growth, the effectiveness ratio has a significant positive effect on economic growth, and the expenditure ratio has a significant negative effect on economic growth. Then, financial performance such as the fiscal decentralization ratio and the expenditure ratio has a significant positive effect on HDI and the effectiveness ratio has no significant effect on HDI. Meanwhile, economic growth has a significant negative effect on HDI. The path analysis showed that economic growth can mediate the expenditure ratio to HDI, but is unable to mediate between the fiscal decentralization ratio and the effectiveness ratio to HDI.*

**Keywords:** regional financial performance, economic growth, *Human Development Index*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadudukan terbanyak di Dunia. Bersumber pada data Bank Dunia (*World Bank*) per Oktober 2022, Indonesia menempati peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah China, India, dan Amerika Serikat dengan mencatatkan jumlah penduduk 274,79 juta jiwa yang mewakili 3,4% dari populasi penduduk dunia. Dengan luas daratan sebesar 1,9 juta km<sup>2</sup>, diketahui bahwa kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2022 adalah 144 jiwa per km<sup>2</sup>. Namun hingga saat ini, sebaran penduduk di Indonesia masih tersentral di Pulau Jawa. Zudan selaku Direktur Jenderal Dukcapil menyampaikan Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dalam jumlah penduduk terbanyak dengan Kabupaten Bogor menjadi daerah terpadatnya (Dukcapil, 2022). Sementara populasi penduduk paling sedikit menurut provinsi berada di Provinsi Kalimantan Utara. Apabila dilihat dari luas wilayahnya, Pulau Jawa merupakan pulau terkecil di Indonesia tetapi memiliki sebaran penduduk paling banyak. Berbanding terbalik dengan Pulau Papua yang menjadi pulau terbesar di Indonesia justru memiliki sebaran penduduk paling sedikit. Fenomena ini dapat berdampak pada permasalahan ketidakmerataan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat yang akhirnya berpengaruh pada tingkat pengangguran serta pendapatan per kapita.

Pembangunan menjadi suatu proses berkelanjutan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pembangunan dapat secara

efektif meningkatkan produktivitas yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi ketika pembangunan dilakukan secara merata dan seluruh lini masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan (Bailusy, 2019) . Terlebih saat ini paradigma pembangunan modern memposisikan manusia sebagai tujuan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian, tujuan dari pembangunan harus meliputi peningkatan kualitas penduduk yang dilihat melalui pengukuran kelayakan hidup, usia harapan hidup, serta kualitas pendidikan. Komitmen kuat dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan, khususnya yang bersifat paling mendasar berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan (Dwiyandari & Badera, 2018). Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan manusia (IPM). HDI merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengukur pengembangan kemampuan individu dan masyarakat dalam segala aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dengan memposisikan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan (HDR, 2022).

Berdasarkan data BPS, Provinsi yang berada di Pulau Jawa memiliki angka *Human Development Index* (HDI) yang terbilang cukup tinggi di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa secara umum menunjukkan tren peningkatan nilai di tahun 2018 hingga 2021, peningkatan dari 71,12 di tahun 2018 menjadi 72,16 di tahun 2021. Sejak tahun 2018 status HDI Jawa Tengah tergolong ke dalam predikat tinggi dan terus mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan tumbuh sebesar 0,55 persen per tahun (Musliman, 2021) . Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 juga tidak

mempengaruhi penurunan angka pertumbuhan HDI di Jawa Tengah. Meskipun terjadi tren peningkatan HDI di Jawa Tengah, data memperlihatkan bahwa provinsi ini menduduki peringkat kedua dari bawah sebelum Jawa Timur dalam HDI menurut provinsi di Pulau Jawa dan berada di bawah angka HDI nasional (BPS, 2021c). Lebih lanjut, peningkatan tren HDI Jawa Tengah nyatanya masih menunjukkan beberapa daerah yang memiliki nilai HDI di bawah rata-rata HDI Provinsi. Fenomena ini memberikan sinyal bahwa Jawa Tengah belum mampu meningkatkan HDI secara maksimal. Beberapa masalah pun masih timbul di wilayah Jawa Tengah seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan, ketergantungan daerah terhadap pendanaan pusat, serta belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah.

Pemerintah sebagai penopang penyedia sarana kebutuhan masyarakat melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan demi mewujudkan keberhasilan pembangunan (Indramawan, 2018). Salah satu faktor pendukung peningkatan pembangunan yang diukur melalui *Human Development Index* adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa pada periode tertentu, sehingga dapat digunakan untuk meninjau tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Saat ini, pembangunan masih terpusat di Jawa dan Sumatera dengan Pulau Jawa yang mendominasi struktur perekonomian dengan menyumbangkan kontribusi sebesar 56,55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Dihni, 2022). Berdasarkan data SIMREG Bappenas (2020), Provinsi Jawa Tengah mengalami tingkat perekonomian yang fluktuatif di tahun 2018 hingga 2021. Laju pertumbuhan

ekonomi di tahun 2018 sebesar 5,3 persen, kemudian naik di tahun 2019 menjadi 5,36 persen. Sedangkan pada tahun 2020 turun hingga ke titik terendah sebesar -2,65 persen yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan perekonomian melemah yang terlihat dari adanya penurunan daya beli serta peningkatan kemiskinan. Kondisi perekonomian mulai membaik dan bergerak maju di tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Meskipun begitu, secara umum pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah merupakan yang terendah apabila dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Jawa.

Selain pertumbuhan ekonomi, otonomi daerah juga menjadi faktor pendukung peningkatan pembangunan. Otonomi daerah merupakan program pemerintah pusat kaitannya dengan kemandirian daerah dalam mengatur sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas (Sudaryo et al., 2021). Otonomi daerah mengusung prinsip desentralisasi, sehingga wewenang proses reformasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya seutuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah (Ristanti & Handoyo, 2017). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatakan pelaksanaan desentralisasi memiliki keunggulan seperti memicu kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah. Sejalan dengan teori federalisme fiskal, desentralisasi fiskal melalui pelimpahan wewenang kepada pemerintah di tingkat yang lebih rendah dapat memicu peningkatan perekonomian dan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan otonomi daerah.

Implementasi kebijakan otonomi daerah pada dasarnya menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan tata pemerintahan dan tata kelola keuangan. Hal ini dikarenakan dengan pelaksanaan desentralisasi maka daerah diberikan tanggung jawab sebagai pelaksana dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga daerah dituntut untuk secara mandiri mengelola sumber daya yang menjadi kekayaan daerahnya, baik dalam hal pembiayaan pembangunan atau dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan menjadi unsur paling penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat sehingga harus dilakukan secara akuntabel, adil, transparan, serta menerapkan prinsip *value for money*, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2021).

Kemampuan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah yang terefleksi dalam peningkatan pendapatan guna kelangsungan pembiayaan pembangunan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mana pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan daerah (Masduki et al., 2022) . Pengelolaan keuangan di Jawa Tengah yang terekspos melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan APBD Provinsi Jawa Tengah termasuk ke dalam urutan bawah se-Jawa dengan mencatatkan 96,91 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi 2,4 persen dibandingkan realisasi pendapatan di tahun 2020. Pendapatan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kinerja pemerintah menurun dan

berdampak pada sektor keuangan pemerintah daerah. Di tahun ini, pemerintah daerah lebih menggantungkan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya kapasitas dan potensi daerah dalam perolehan sumber pendapatannya. Walaupun Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan realisasi pendapatan yang semakin baik, tetapi secara rata-rata pendapatan ini masih tergolong kecil apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Lebih lanjut, hingga saat ini masih timbul permasalahan terkait tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah yang mengindikasikan belum tercapainya tujuan utama dari otonomi daerah terhadap peningkatan kesejahteraan. Akuntabilitas sendiri bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas terhadap publik (Mardiasmo, 2021).

Kualitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi pada performa pemerintah yang tercermin dalam kinerja keuangan daerah. Adapun alat pengukuran penilaian kinerja keuangan adalah analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan dengan membandingkan hasil capaian satu periode dengan periode sebelumnya guna mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Menurut Harliyani & Haryadi (2016) analisis terbagi menjadi dua sisi, yaitu analisis dari sisi pendapatan dan analisis dari sisi belanja. Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah dilihat dari sisi pendapatan antara lain rasio derajat desentralisasi fiskal yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mencukupi seluruh kebutuhannya serta rasio efektivitas Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan seluruh perolehan Pendapatan Asli Daerah untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan sisi belanja dilihat melalui rasio belanja yang mencerminkan keseimbangan belanja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting untuk pemerintah dalam mengelola keuangan daerah karena semakin baik kinerja keuangan suatu daerah maka tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah akan tercapai.

Beberapa literatur telah menyajikan hubungan antara kinerja keuangan terhadap HDI. Dwiwandari & Badera (2018) memaparkan bahwa IPM dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah. Relevan dengan Azwandi et al. (2022) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap IPM. Penelitian oleh Masduki et al. (2022) juga menunjukkan pengaruh positif antara kualitas pengeluaran pemerintah terhadap HDI. Di sisi lain, Sari & Riharjo (2020) memaparkan bahwa IPM tidak dipengaruhi oleh kinerja keuangan dari rasio kemandirian keuangan dan rasio efektivitas PAD. Hasil penelitian oleh Habbe (2021) juga menunjukkan bahwa efektivitas PAD dan keselarasan pengeluaran gagal menaikkan HDI tetapi kinerja otonomi dan penyerapan anggaran mampu menaikkan HDI. Analisis kondisi keuangan daerah telah banyak dilakukan penelitian, tetapi belum banyak yang mengamati kondisi keuangan pemerintah daerah selama terjadinya pandemi Covid-19. Kondisi pandemi menyebabkan

pemerintah menghadapi dua tantangan secara bersamaan, yaitu terjadinya penurunan perolehan pendapatan daerah tetapi di sudut lain pemerintah daerah dituntut untuk tetap memiliki kebijakan pendanaan yang dapat mendorong perekonomian di masa pandemi.

Belum banyak pula literatur yang menghubungkan kinerja keuangan dan HDI dengan pertumbuhan ekonomi. Padahal peningkatan kegiatan ekonomi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serangkaian penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap HDI, seperti yang dilakukan oleh Hay et al. (2017) ; Ali et al. (2021) serta Alexandri (2022) . Namun, temuan berbeda oleh Dwiandari & Badera (2018) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak dipengaruhi oleh kinerja keuangan serta pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi kinerja keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dengan ketidakkonsistenan hasil penelitian, maka belum ditemukan hubungan linier antara kinerja keuangan daerah dengan HDI. Perumusan hasil akhir yang belum konklusif mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan kinerja keuangan daerah terhadap HDI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah lebih lanjut penelitian sebelumnya dengan menjadikan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Penelitian juga tidak hanya akan difokuskan pada analisis kinerja keuangan melalui rasio keuangan berdasarkan sisi pendapatan, tetapi juga melihat rasio keuangan dari sisi belanja, khususnya di

tahun 2018 hingga 2021 untuk melihat fluktuasi kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah sebelum dan selama masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, maka dilakukan suatu penelitian yang berjudul “**Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan *Human Development Index* di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2021**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode 2018-2021?
2. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap *Human Development Index* di Jawa Tengah periode 2018-2021?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap *Human Development Index* di Jawa Tengah periode 2018-2021?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi mampu memediasi kinerja keuangan terhadap *Human Development Index* di Jawa Tengah periode 2018-2021?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode 2018-2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap *Human Development Index* di Jawa Tengah periode 2018-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap *Human Development Index* di Jawa Tengah periode 2018-2021.
4. Untuk mengetahui kemampuan pertumbuhan ekonomi memediasi hubungan antara kinerja keuangan terhadap *Human Development Index* di Jawa Tengah periode 2018-2021.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tempat untuk mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat menambah wawasan penulis, khususnya dalam memahami kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah melalui analisis rasio-rasio keuangan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memahami pengaruh kinerja keuangan terhadap *Human Development Index*, serta pengaruhnya dengan pertumbuhan ekonomi.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi dan tambahan pengetahuan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian serupa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi sektor pemerintah daerah diharapkan mampu membantu memberikan tambahan informasi sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan supaya dapat mendorong efektivitas kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Tengah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat umum, diharapkan mampu memberikan tambahan informasi terkait kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada periode 2018-2021 sehingga masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam pengembangan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi tentang pentingnya penelitian dan penjelasan masalah yang tertuang dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab kajian pustaka menguraikan alasan teoritis penelitian yang tertuang dalam landasan teori, telaah penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian untuk setiap variabel serta kerangka penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian menjelaskan mengenai data dan metode yang digunakan terkait dengan analisis yang dipaparkan dalam populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab analisis data dan pembahasan memaparkan data penelitian, hasil penelitian, serta analisis hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan termasuk jawaban atas pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism Theory*)

Teori federalisme fiskal memberikan interpretasi mengenai dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian, pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Teori yang mengutarakan bahwa perilaku pemerintah daerah dipengaruhi oleh pelaksanaan desentralisasi fiskal ini memberikan perspektif mengenai pentingnya pembagian kewenangan dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran di tingkat pemerintahan (Musgrave, 1959). Model federalisme fiskal memberikan implikasi bahwa pemerintah pusat berkuasa untuk mengatur hubungan keuangan antara pemerintahan dalam rangka menekan permasalahan yang diimplementasikan dalam bentuk transfer kepada pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian regional dan infrastruktur lokal.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 1999, teori federalisme fiskal mulai dapat diterapkan di skala lembaga sektor publik dengan mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di mana pemerintah daerah memiliki proporsi wewenang yang lebih besar dalam menjalankan perekonomiannya ketika pengelolaan pembangunan di daerah oleh pemerintah pusat dibatasi. Keberhasilan desentralisasi fiskal tercapai ketika terjadi pemerataan fiskal secara vertikal antara pemerintahan pusat dengan daerah serta pemerataan fiskal secara horizontal antar daerah otonom. Namun, persoalan

seringkali terlihat ketika terjadi ketimpangan tingkat pemerataan fiskal akibat adanya perbedaan kapasitas fiskal terkait kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dengan kebutuhan fiskal (Kemenkeu, 2021) . Dalam rangka pencapaian pemerataan fiskal, dibutuhkan suatu formula melalui sistem transfer fiskal antar daerah secara efektif sehingga meminimalisir kesenjangan.

Teori federalisme fiskal dapat dijadikan dasar untuk memahami hubungan antara kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan *Human Development Index* karena pemberlakuan kebijakan desentralisasi di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan pembangunan daerah menjadi lebih baik melalui pengelolaan sumber daya yang handal di seluruh aspek sehingga memastikan kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu (2021) mengatakan bahwa pemerintah pusat sebagai pemilik kapasitas pengelolaan anggaran yang lebih besar harus mampu mengakomodir kebijakan pemerataan penerimaan serta sebagai peredam gejolak ekonomi. Sementara itu, pemerintah daerah bertugas menentukan tingkat efisiensi barang publik dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah**

### **2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut Welly & Djuniar (2017) kinerja mengacu pada pencapaian prestasi yang diperoleh organisasi selama periode tertentu atas pelaksanaan program demi mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Kinerja terlaksana dengan baik ketika pencapaian sejalan sesuai perencanaan. Sebaliknya, kinerja dikatakan tidak terlaksana dengan baik ketika pencapaian dan perencanaan

menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja diartikan sebagai hasil dari pencapaian program berdasarkan pemakaian anggaran sesuai penaksiran kuantitas dan kualitas. Puryatama & Setyowati (2021) mengatakan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan hasil pengukuran suatu aktivitas yang berhubungan dengan anggaran daerah dan bermanfaat untuk meninjau kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Kinerja keuangan daerah merujuk pada tingkat keterlibatan pemerintah dalam bidang keuangan yang mencakup pendapatan dan pengeluaran daerah melalui indikator keuangan sesuai dengan kebijakan perundang-undangan sehubungan dengan kemandirian pemerintah daerah dalam kemampuan pengelolaan seluruh sumber-sumber keuangan asli daerah.

#### **2.1.1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan menjadi suatu parameter pengendalian keuangan organisasi yang dihubungkan dengan pusat pertanggungjawaban dan berguna untuk alat pengendalian organisasi (Mardiasmo, 2018) . Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengukuran kinerja publik melalui alat pengukuran keuangan dan non-keuangan dengan tujuan membantu manajer publik dalam melakukan evaluasi capaian strategi.

Menurut Mardiasmo (2018) , tujuan pengukuran kinerja sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja sektor publik mampu membenahi kinerja pemerintahan dalam hal program kerja sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien
2. Pengukuran kinerja sektor publik dipergunakan untuk pengalokasian sumber daya serta penentu keputusan
3. Pengukuran kinerja sektor publik sebagai wujud akuntabilitas publik dalam rangka menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja memiliki peranan penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah untuk memastikan bahwa pembelanjaan telah dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik (Mardiasmo, 2018). Keandalan sistem pengukuran kinerja menjadi faktor kesuksesan organisasi. Pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan diharuskan melaporkan pertanggungjawaban keuangan untuk menilai hasil kerjanya. Adapun pemanfaatan rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja pemerintah daerah.

### **2.1.1.3 Rasio Keuangan Sebagai Indikator Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan daerah dapat dianalisis dengan menilai kinerja sebelumnya melalui rasio-rasio keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga memperoleh informasi tentang realisasi posisi keuangan suatu entitas serta potensi kinerja yang sedang berjalan. Halim & Kusufi (2012)

mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran seberapa jauh posisi keuangan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain.

Adapun penggunaan rasio keuangan oleh organisasi pemerintah dalam menilai kinerja keuangan, meliputi:

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal merupakan rasio yang menerangkan hubungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Rasio yang biasa disebut derajat otonomi fiskal daerah ini menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara menyeluruh karena menjadi gambaran kesanggupan daerah dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah yang diikuti dengan kemampuan pemungutan pajak serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang semakin meningkat menandakan semakin baik kemampuan pelaksanaan desentralisasi oleh pemerintah daerah (Mahmudi, 2019).

Adapun perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Derajat Desentralisasi Fiskal} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas berkaitan dengan derajat keberhasilan operasi yang berarti keefektifan organisasi sektor publik dapat tercapai apabila penyelenggaraan kegiatan memiliki dampak yang kuat terhadap keberhasilan penyediaan pelayanan untuk masyarakat. Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas PAD sebagai indikator rasio keuangan terkait kesanggupan pemerintah daerah dalam mengelola perolehan PAD berdasarkan perencanaan target. Analisis rasio dilakukan melalui perbandingan realisasi perolehan PAD terhadap target perolehan PAD yang dianggarkan.

Adapun perhitungan rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### c. Rasio Belanja

Anggaran memiliki peran dalam hal distribusi, alokasi, dan stabilisasi sehingga dibutuhkan suatu analisis belanja yang berguna untuk melihat keseimbangan antar belanja agar peran anggaran dapat berjalan secara optimal (Mahmudi, 2019). Keserasian belanja menafsirkan prioritas keoptimalan alokasi pengeluaran dana oleh pemerintah daerah dalam rangka belanja rutin dan belanja pembangunan (belanja modal). Nilai alokasi belanja rutin yang semakin tinggi akan mengakibatkan nilai belanja pembangunan yang bertujuan sebagai penyedia sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin mengecil. Sedangkan kualitas daerah ditentukan ketika kemampuan belanja pembangunan lebih besar daripada dari belanja rutin (Welly & Djuniar, 2017).

Adapun

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

perhitungan rasio belanja adalah sebagai berikut:

### 2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Yasin (2020), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses perubahan keadaan perekonomian negara secara berkelanjutan menjadi lebih baik di setiap periodenya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu pengukuran keberhasilan pembangunan yang terlihat dari proses peningkatan output perkapita dalam jangka panjang, dimana semakin bertambahnya aktivitas produksi berakibat pada peningkatan laju perekonomian yang diikuti pemerataan pendapatan serta berdampak kepada kesejahteraan masyarakat (Suwandi & Tahar, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari kenaikan pendapatan nasional dianggap sebagai langkah untuk merubah keadaan perekonomian secara berkelanjutan menuju ke kondisi yang lebih baik di setiap periodenya. Selain kegiatan terkait dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk menjadi komponen utama yang merangsang pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) suatu daerah merupakan hasil akumulasi nilai tambah barang dan jasa akhir satu tahun dari serangkaian aktivitas suatu wilayah yang tercermin melalui harga pasar dan menjadi indikator penting untuk melihat kondisi pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rentang periode tertentu, baik berdasarkan harga berlaku untuk melihat perkembangan struktur ekonomi riil di tahun tersebut maupun berdasarkan harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Prihastuti et al., 2015). Secara konseptual, PDRB dapat dihitung melalui beberapa jenis pendekatan, seperti pendekatan produksi yang dihitung berdasarkan hasil nilai barang dan jasa akhir dari setiap hasil unit produksi wilayah pada kurun waktu tertentu, pendekatan pendapatan yang dihitung berdasarkan penerimaan balas jasa dari proses produksi di wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu, serta pendekatan pengeluaran yang dihitung berdasarkan penjumlahan semua komponen permintaan akhir.

Pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan kemampuan keuangan daerah sehingga dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah dituntut untuk memiliki kebijakan terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi perolehan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah serta pengelolaan proporsi pengeluaran dalam pembangunan di sektor produktif (Suwandi & Tahar, 2015).

#### **2.1.4 *Human Development Index***

*Human Development* atau pembangunan manusia yang diperkenalkan pertama kali oleh *United Nation Development Program* (UNDP) di tahun 1990 dan secara berkala dipublikasikan dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR) merupakan sebuah konsep yang menjadikan manusia sebagai prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan (*Human Centered Development*) (BPS, 2021b) . *Human Development* menggambarkan isu-isu yang terjadi di masyarakat untuk semua aspek secara komprehensif, seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, dan nilai kultural lain berdasarkan perspektif manusia dan gender. Winarni et al. (2022) menjelaskan berbagai konsep yang diulas terkait *Human Development*, seperti teori dan skala pembangunan manusia, dimensi global pembangunan manusia, kontribusi penduduk, dimensi baru dari keamanan manusia, pemberantasan kemiskinan, serta gender pertumbuhan ekonomi.

*Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indeks komposit dan indikator untuk menjelaskan pertumbuhan pembangunan manusia secara terukur dan representatif (Azwandi et al., 2022) . BPS (2013) mendefinisikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran pencapaian pembangunan yang didasarkan pada beberapa komponen dasar kualitas hidup, yaitu umur panjang serta kesehatan yang diukur berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, ilmu pengetahuan yang diukur berdasarkan rata-rata lama pendidikan sekolah dan literasi, serta standar hidup layak yang diukur melalui pendapatan per kapita terhadap kemampuan daya beli masyarakat. HDI digambarkan sebagai hasil pelaksanaan program pembangunan

pemerintah di tahun sebelumnya dengan menilai kemajuan program dalam kurun waktu tertentu serta melihat bagaimana manusia memiliki hak untuk mengakses hasil pembangunan, termasuk pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Terdapat aspek dari paradigma HDI untuk meyakinkan ketercapaian tujuan pembangunan manusia, yaitu peningkatan produktivitas dan keterlibatan penuh dalam memperoleh pendapatan, pemerataan perolehan akses sumber daya ekonomi dan sosial, keberlanjutan terhadap akses di masa yang akan datang, serta pemberdayaan dalam proses pembangunan (Fretes, 2017).

Konsep *Human Development* menganalisis pembangunan dari sudut pandang ekonomi serta manusia secara keseluruhan. Konsep ini menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dan pembangunan menjadi alat pencapaian tujuan. Oleh karena itu dalam implikasinya, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memprioritaskan manusia sebagai fokus perhatian dengan berupaya meningkatkan serta memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal dengan menciptakan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan demi kesejahteraan masyarakat (Mahroji, 2019). Kesempatan kerja akan dipengaruhi dari peningkatan produksi akibat jumlah penawaran barang dan jasa oleh pelaku ekonomi di seluruh sektor perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menurunkan tingkat pengangguran. Dalam hal mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia, dibutuhkan kesiapan infrastruktur sebagai fasilitas fisik yang dapat meningkatkan investasi serta mempercepat pembangunan. Ketersediaan infrastruktur berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting sebagai aparat untuk meningkatkan produktivitas manusia dengan cara meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*). Bentuk kebijakan pemerintah dalam menunjang pengembangan kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Arsyad, 2010). Pengeluaran pemerintah melalui belanja daerah digunakan untuk melakukan investasi sektor publik utamanya di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas sumber daya manusia.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian serupa mengenai pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan *Human Development Index* telah dikaji sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat dijadikan tolok ukur dan rujukan atas rencana penelitian serta bermanfaat sebagai pembandingan analisis hasil penelitian.

Penelitian pertama dilakukan di Provinsi Papua Barat oleh Hay et al. (2017) dengan maksud mengungkap hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta pengangguran. Hasil regresi melalui data panel membuktikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan rasio pertumbuhan, rasio fit, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi tidak memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan secara segmental,

peningkatan rasio-rasio keuangan secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian selanjutnya oleh Purbadharmaja et al. (2019) menelaah hubungan desentralisasi fiskal dan tata kelola anggaran terhadap kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten dan kota Provinsi Bali. Hasil pengujian model struktural memaparkan bahwa desentralisasi fiskal mempengaruhi secara langsung alokasi anggaran dan kapasitas ekonomi, tetapi tidak mempengaruhi tata kelola anggaran serta kesejahteraan masyarakat. Sementara tata kelola anggaran memberikan pengaruh terhadap alokasi anggaran, kapasitas ekonomi, dan kesejahteraan manusia secara langsung.

Kemudian, Ali et al. (2021) melangsungkan penelitian untuk menjelaskan hubungan keuangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap *human capital* di negara berpenghasilan rendah. Temuan penelitian melalui analisis regresi linier membuktikan bahwa indikator keuangan yang diukur berdasarkan besaran uang beredar dan kredit sektor swasta berdampak positif dan signifikan terhadap *human capital*. Hasil berbeda terlihat dari indikator keuangan yang diukur melalui kredit bank dengan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap *human capital*. Kemudian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan *human capital* menemukan hasil yang positif dan signifikan.

Penelitian di tahun yang sama oleh Habbe (2021) yaitu menguji hubungan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kesejahteraan pada 25 kota dan kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian melalui analisis regresi

memperlihatkan bahwa kinerja otonomi daerah mampu meningkatkan HDI serta menurunkan angka kemiskinan tetapi tidak berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Kemudian efektivitas PAD mampu menurunkan angka pengangguran tetapi gagal meningkatkan HDI serta mengurangi kemiskinan. Selain itu, keselarasan pengeluaran pemerintah daerah mampu mengurangi kemiskinan tetapi tidak mampu menaikkan HDI dan menurunkan tingkat pengangguran. Sedangkan tingkat penyerapan anggaran dapat meningkatkan HDI serta menurunkan angka pengangguran tetapi tidak dapat menurunkan kemiskinan. Secara umum, keselarasan pengeluaran pemerintah daerah dan penyerapan anggaran tidak dapat memoderasi hubungan antara otonomi daerah, efektivitas PAD dan HDI, tingkat pengangguran dan kemiskinan, tetapi keserasian belanja mampu memoderasi efektivitas PAD dalam kaitannya dengan HDI.

Azwandi et al. (2022) melakukan penelitian di tahun berikutnya mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap HDI yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota Provinsi Kepulauan Riau. Kesimpulan dari penelitian adalah terdapat hubungan positif signifikan antara rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, serta rasio efektivitas PAD dengan pertumbuhan ekonomi serta *Human Development Index*. Kemudian, rasio desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas PAD berhubungan positif signifikan terhadap *Human Development Index* yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi rasio kemandirian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Human Development Index* dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain pada tahun yang sama oleh Alexandri (2022) bertujuan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Pulau Sumatera. Berdasarkan analisis regresi linier berganda, dihasilkan kesimpulan bahwa tingkat pembiayaan perolehan pendapatan dengan realisasi pendapatan daerah sudah efisien yang ditunjukkan melalui rasio efisiensi. Sedangkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, secara bersama-sama rasio keuangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Sumatera.

Masduki et al. (2022) mengkaji kualitas belanja pemerintah dan mengaitkan pengaruhnya terhadap angka kemiskinan dan HDI daerah tertinggal di Jawa. Melalui metode PLS-SEM ditemukan hasil pengeluaran pemerintah yang berkualitas dapat menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan HDI. Sehingga, belanja pemerintah dapat dikatakan berkualitas ketika didukung oleh konstruk prioritas, alokasi, waktu, akuntabilitas, dan efektivitas.

Secara ringkas hasil penelitian sebelumnya ditampilkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Peneliti	Hasil
1	<i>Analysis of Regional Finance Performance on Economic Growth, Poverty and Unemployment in West</i>	Rasio pertumbuhan, rasio fit, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara segmental,

	<i>Papua Province, Indonesia</i> (Hay et al., 2017)	peningkatan rasio-rasio keuangan secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2	<i>The Implications of Fiscal Decentralization and Budget Governance on Economic Capacity and Community Welfare</i> (Purbadharmaja et al., 2019)	Desentralisasi fiskal mempengaruhi secara langsung alokasi anggaran dan kapasitas ekonomi, tetapi tidak mempengaruhi tata kelola anggaran serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tata kelola anggaran memberikan pengaruh terhadap alokasi anggaran, kapasitas ekonomi, dan kesejahteraan manusia secara langsung.
3	<i>How Financial Development And Economic Growth Influence Human Capital In Low-Income Countries</i> (Ali et al., 2021)	Indikator keuangan yang diukur berdasarkan besaran uang beredar dan kredit sektor swasta memiliki dampak positif dan signifikan terhadap <i>human capital</i> . Hasil berbeda terlihat dari indikator keuangan yang diukur melalui kredit bank dengan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>human capital</i> . Kemudian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan <i>human capital</i> menemukan hasil yang positif dan signifikan.
4	<i>The Exploration of Effect of Financial Performance to the Public Welfare</i> (Habbe, 2021)	Kinerja otonomi daerah mampu meningkatkan HDI serta menurunkan angka kemiskinan tetapi tidak berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Kemudian efektivitas PAD mampu menurunkan angka pengangguran tetapi gagal meningkatkan HDI serta mengurangi kemiskinan. Selain itu, keselarasan pengeluaran pemerintah daerah mampu mengurangi kemiskinan tetapi tidak mampu menaikkan HDI dan menurunkan tingkat pengangguran. Sedangkan tingkat penyerapan anggaran dapat meningkatkan HDI serta menurunkan angka pengangguran tetapi tidak dapat menurunkan kemiskinan. Secara umum, keselarasan pengeluaran pemerintah daerah dan penyerapan anggaran tidak dapat memoderasi hubungan antara otonomi daerah, efektivitas PAD dan HDI,

		tingkat pengangguran dan kemiskinan, tetapi keserasian belanja mampu memoderasi efektivitas PAD dalam kaitannya dengan HDI.
5	<i>The Effect of Financial Performance on the Human Development Index Moderated Economic Growth in Regency/City in the Province of Riau Island</i> (Azwandi et al., 2022)	Rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas PAD memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas PAD memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap <i>Human Development Index</i> . Selain itu, rasio desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas PAD berhubungan positif dan signifikan terhadap <i>Human Development Index</i> yang dimediasi oleh Pertumbuhan Ekonomi, tetapi rasio kemandirian kemandirian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>Human Development Index</i> dimediasi oleh Pertumbuhan Ekonomi.
6	<i>Effect of Financial Performance on Economic Growth (District/City Case Study on Sumatera Island)</i> (Alexandri, 2022)	Tingkat pembiayaan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan daerah sudah efisien yang ditunjukkan dari rasio efisiensinya. Sedangkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, secara bersama-sama rasio keuangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Sumatera.
7	<i>How Can Quality Regional Spending Reduce Poverty and Improve Human Development Index?</i> (Masduki et al., 2022)	Pengeluaran pemerintah yang berkualitas dapat menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan HDI. Belanja pemerintah dapat dikatakan berkualitas ketika didukung oleh konstruk prioritas, alokasi, waktu, akuntabilitas, dan efektivitas.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program operasional tidak lepas dari pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) hingga pertanggungjawaban kepala daerah kepada legislatif. Anggaran digunakan pemerintah sebagai pedoman untuk mengelola keuangan sehingga kinerja pemerintah daerah lebih terukur. Analisis kinerja keuangan menjadi informasi krusial khususnya dalam menilai keberhasilan pengambilan kebijakan pemerintah terkait pengorganisasian keuangan daerah di satu periode anggaran dengan menggunakan beberapa indikator keuangan, baik dari aspek pendapatan maupun aspek belanja (Purbadharmaja et al., 2019). Kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi daerah serta kebijakan pendanaan yang mengarah pada kemakmuran akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan bermuara pada keberhasilan pembangunan perekonomian.

Desentralisasi fiskal menjelaskan pengaruh perolehan Pendapatan Asli Daerah untuk dialokasikan kepada sektor ekonomi secara tepat sesuai kebutuhan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seiring meningkatnya desentralisasi fiskal dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Searah dengan penelitian Purbadharmaja et al. (2019), desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi secara langsung alokasi anggaran dan kapasitas ekonomi. Azwandi et al. (2022) juga mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara derajat desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan teori dan kajian empiris, maka disajikan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi*

Efektivitas penerimaan mencerminkan keberhasilan perolehan sasaran Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan perencanaan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berarti pemerintah daerah dapat mengeluarkan lebih banyak dana untuk menggali potensi daerah sehingga secara efektif mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Sebagaimana dikatakan Hay et al. (2017), peningkatan rasio keuangan berupa efektivitas secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang berarti peningkatan pendapatan berdampak terhadap pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pada program pembangunan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, Alexandri (2022) juga menyimpulkan bahwa rasio efektivitas keuangan mampu mempengaruhi secara signifikan dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pemaparan teori dan kajian empiris, maka disajikan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Kinerja keuangan berupa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi*

Kondisi penting lain yang menjadi atensi pemerintah daerah selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah pengelolaan anggaran belanja secara efisien. Ketepatan program pemerintah dalam mendistribusikan porsi belanja daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dapat

memicu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Senada dengan Deswantoro et al. (2017) , belanja pegawai dan belanja pembangunan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pemaparan teori dan kajian empiris, maka disajikan hipotesis sebagai berikut:

*H3 : Kinerja keuangan berupa rasio belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi*

### **2.3.2 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Human Development Index***

Kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi penilaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Habbe, 2021) . Semakin mandiri suatu pemerintah daerah ketika memperoleh pendapatan, maka semakin mampu daerah tersebut mengatur dan menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahtraannya. Sejalan dengan Winarni et al. (2022) dan Azwandi et al. (2022) , terdapat hubungan positif signifikan antara rasio derajat desentralisasi fiskal dengan IPM. Adapun hipotesis yang dirumuskan dari paparan sebelumnya adalah sebagai berikut:

*H4 : Kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap Human Development Index*

Kemampuan daerah dalam pengelolaan pendapatan secara efektif dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin efektif pemerintah daerah dalam mengalokasikan keuangan untuk menggali potensi daerahnya, maka akan meningkatkan pembangunan daerah. Senada dengan hasil penelitian oleh Hamimah & Zulkarnain (2020) yang mengemukakan bahwa IPM dipengaruhi rasio efektivitas PAD secara langsung.

Habbe (2021) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa kinerja otonomi daerah dan penyerapan anggaran mampu meningkatkan HDI. Adapun hipotesis yang dirumuskan dari paparan sebelumnya adalah sebagai berikut:

*H5 : Kinerja keuangan berupa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Human Development Index*

Beralih ke analisis pengeluaran, tingkat keselarasan belanja daerah yang optimal terjadi ketika pemerintah daerah memprioritaskan porsi dana belanja modal daripada belanja operasional. Kemampuan daerah dalam mengalokasikan belanja modal dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan Masduki et al. (2022), terdapat hubungan positif antara kualitas pengeluaran pemerintah terhadap HDI. Adapun hipotesis yang dirumuskan dari paparan sebelumnya adalah sebagai berikut:

*H6 : Kinerja keuangan berupa rasio belanja berpengaruh positif terhadap Human Development Index*

### **2.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Human Development Index***

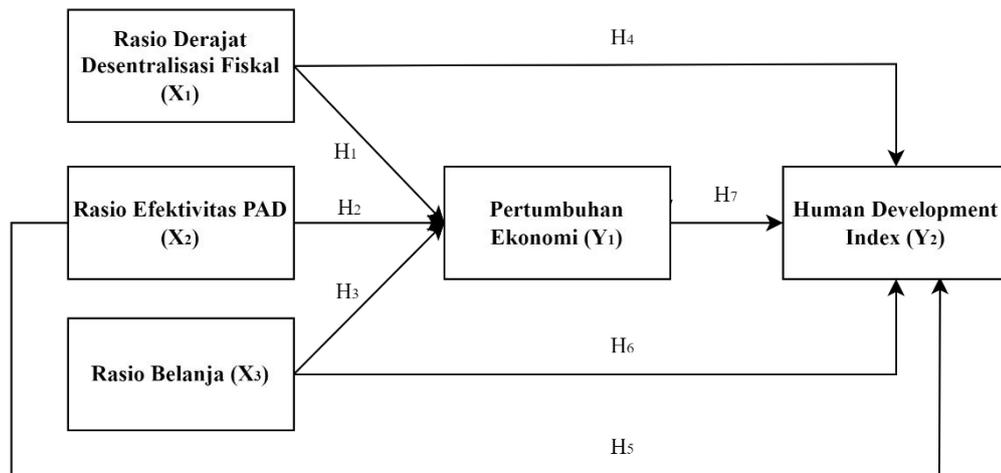
Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai parameter utama untuk menilai kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah terhadap penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan perekonomian yang menghasilkan pemasukan tambahan bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pemerintah daerah dalam memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sebagai instrumen pendorong pembangunan ekonomi dengan memberikan jasa pelayanan publik serta mengeksplorasi sumber daya daerahnya dapat menciptakan kesejahteraan

masyarakat. Peningkatan perekonomian yang tercermin dari kenaikan pendapatan atau PDB per kapita akan mempengaruhi pembangunan manusia karena distribusi pendapatan akan mengakibatkan terjadinya peningkatan daya beli masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi standar minimal kelayakan hidup. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ali et al. (2021) yang menyimpulkan adanya hubungan positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap *human capital* serta penelitian Azwandi et al. (2022) bahwa pertumbuhan perekonomian mampu mempengaruhi secara signifikan dan memberikan kontribusi positif terhadap *Human Development Index* daerah. Berdasarkan pemaparan teori dan kajian empiris, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>7</sub> : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Human Development Index*

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan paparan teori serta analisis penelitian terdahulu, peneliti bermaksud untuk menguji pengaruh kinerja keuangan berdasarkan rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio belanja terhadap *Human Development Index* dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Abdullah (2015) diartikan sebagai keseluruhan objek atau subjek yang dianalisis karakteristiknya untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota tahun anggaran 2018 – 2021. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada permasalahan belum optimalnya pemerintah dalam pembangunan kualitas manusia yang dilihat dari kenaikan angka HDI Jawa Tengah di setiap tahunnya, tetapi masih menduduki peringkat kedua terakhir dalam peringkat HDI menurut provinsi di Pulau Jawa serta berada di bawah level HDI nasional (BPS, 2021c).

Sementara sampel merupakan bagian dari populasi yang berfungsi sebagai elemen pokok dalam keunggulan penelitian karena penetapan sampel pada suatu teknik pengambilan sampel akan merefleksikan karakteristik populasi (Abdullah, 2015). Parameter sampel pada penelitian adalah laporan keuangan daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta *Human Development Index* (HDI) pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2018 – 2021 dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memilih metode penelitian kuantitatif sehingga fenomena diungkapkan dengan mendasarkan angka atau parameter statistik. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kuantitatif diartikan sebagai suatu pendekatan ilmiah dan sistematis berlandaskan filsafat positivisme dengan memandang bahwa fenomena dapat diklasifikasikan, dengan tujuan menggambarkan dan menguji hubungan antar variabel. Penelitian ini didesain dengan menganalisis variabel yang mempengaruhi (independen) berupa kinerja keuangan dengan variabel yang dipengaruhi (dependen) berupa *Human Development Index* melalui variabel mediasi berupa pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis data dipergunakan untuk menarik kesimpulan penelitian, menolak atau menerima pengembangan hipotesis dari telaah teoritis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data panel karena mencakup data urut waktu (*time series*) selama empat tahun yang diawali tahun 2018 hingga 2021 serta data silang (*cross section*) untuk pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berarti informasi data diperoleh secara tidak langsung melalui publikasi instansi-instansi terkait (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data keuangan daerah, PDRB, serta HDI dilakukan dalam rentang tahun anggaran 2018 – 2021 yang didapatkan dari sumber-sumber relevan seperti *website* instansi terkait dan dokumentasi lain berupa publikasi. Pengukuran kinerja keuangan melalui rasio-rasio keuangan bersumber pada laporan keuangan daerah berupa laporan realisasi APBD yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan Indonesia. Kemudian data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah diperoleh dari *website* BPS melalui publikasi PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran pada indikator PDRB dalam satuan juta rupiah (BPS, 2021a) . Sedangkan informasi HDI bersumber dari tabel [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia pada *website* BPS Provinsi Jawa Tengah.

### 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel penelitian

Abdullah (2015) mengatakan variabel dalam konteks penelitian merupakan suatu konsep yang lebih konkret dengan acuan langsung yang lebih nyata dimana karakteristik setiap individu atau objek memiliki ukuran, nilai, skor yang berbeda sehingga memperoleh informasi relevan dan dapat menghasilkan kesimpulan. Adapun macam-macam variabel penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain, yaitu variabel independen (X), variabel mediasi ( $Y_1$ ), dan variabel dependen ( $Y_2$ ) dengan uraian sebagai berikut:

#### 3.3.1 Variabel Independen

Variabel yang juga disebut sebagai variabel eksogen atau variabel bebas ini didefinisikan sebagai variabel yang mempengaruhi arah atau perubahan dari variabel dependen (Abdullah, 2015) . Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah dengan indikator rasio derajat desentralisasi fiskal ( $X_1$ ), rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ), dan rasio belanja ( $X_3$ ).

### 3.3.1.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ( $X_1$ )

Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang diikuti dengan kemampuan pemungutan pajak. Pengukuran rasio ditunjukkan melalui perbandingan antara perolehan Pendapatan Asli Daerah terhadap total perolehan daerah. Berikut adalah formulasi perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kategori penetapan desentralisasi fiskal keuangan daerah dapat dilihat dengan skala interval sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal**

Persentase Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Kinerja Keuangan
0,00 – 10,00 %	Sangat kurang
10,01 – 20,00 %	Kurang
20,01 – 30,00 %	Sedang
30, 01 – 40,00 %	Cukup
40,01 – 50,00 %	Baik
> 50,00 %	Sangat baik

Devas (1989) mengatakan bahwa implementasi dari skala interval sebagai tolak ukur penentu tingkat derajat desentralisasi fiskal suatu daerah adalah bahwa angka 20 persen sudah bermakna daerah telah memiliki tingkat otonomi fiskal yang baik. Ketika skala menunjukkan angka kurang dari 20 persen maka

keputusan pemerintah daerah didominasi pemerintah pusat yang mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan kredibilitasnya.

### 3.3.1.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X<sub>2</sub>)

Tingkat efektivitas keuangan daerah merupakan ukuran keberhasilan operasi yang efektif dalam merealisasikan pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan terhadap penyediaan pelayanan untuk masyarakat. Pengukuran rasio dihitung berdasarkan perbandingan realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah terhadap target perolehan Pendapatan Asli Daerah. Berikut merupakan formulasi untuk menghitung rasio efektivitas PAD:

Kemampuan kinerja keuangan dapat dikategorikan sesuai kriteria efektivitas keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 3. 2**

#### **Kriteria Kemampuan Efektivitas Daerah**

Persentase Efektivitas (%)	Kemampuan Kinerja Keuangan
> 100 %	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
70% - 80%	Kurang efektif
0% - 60%	Tidak efektif

Keefektifan Pendapatan Asli Daerah tercapai ketika kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas yang diukur melalui perhitungan rasio minimal

mencapai angka 100 persen (Halim & Kusufi, 2012) . Rasio efektivitas yang semakin meningkat menandakan semakin baik kemampuan pemerintah daerah.

### 3.3.1.3 Rasio Belanja (X<sub>3</sub>)

Keserasian belanja menggambarkan tingkat keoptimalan alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam realisasi porsi belanja operasi dan realisasi porsi belanja modal untuk pembangunan. Formulasi untuk mengukur rasio belanja adalah:

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### 3.3.2 Variabel Mediasi

Variabel mediasi yang juga disebut sebagai variabel intervening diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen sekaligus mempengaruhi variabel dependen (Deswantoro et al., 2017). Variabel ini berada diantara variabel independen dan dependen, bersifat mempengaruhi tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.

#### 3.3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi (Y<sub>1</sub>)

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator pengukuran kesuksesan pembangunan yang dilihat dari kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi

indikator untuk menilai laju pertumbuhan ekonomi menurut harga konstan.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PDRB_t$  = Produk Domestik Regional Bruto tahun t

$PDRB_{t-1}$  = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelum t

### 3.3.3 Variabel Dependen

Variabel yang juga disebut sebagai variabel endogen atau variabel terikat didefinisikan sebagai variabel yang diakibatkan oleh pengaruh dari variabel bebas dan tidak dapat mempengaruhi variabel lain (Abdullah, 2015). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Human Development Index*.

#### 3.3.3.1 Human Development Index ( $Y_2$ )

*Human Development Index* (HDI) digunakan sebagai indeks komposit dan indikator untuk menjelaskan pertumbuhan pembangunan manusia secara terukur dan representatif sehingga meningkatkan kualitas hidup, berdasarkan faktor kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Penelitian ini menggunakan data persentase IPM yang diperoleh dari data tahunan BPS.

Kategori *Human Development Index* dapat diukur melalui skala interval sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**

**Kategori Human Development Index (HDI)**

Interval HDI (%)	Kategori
0 – 50	<i>Low Human Development</i>
51 – 79	<i>Modest Human Development</i>
80 – 100	<i>High Human Development</i>

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan suatu teknik untuk menguraikan pola hubungan seperangkat variabel independen terhadap variabel dependen sehingga mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung (Riduwan & Kuncoro, 2017). Adapun model regresi persamaan struktural yang digunakan dalam metode analisis jalur adalah sebagai berikut:

$$\text{Model I} \quad PE = \alpha_1 + \beta_{1.1}DES + \beta_{2.1}EFE + \beta_{3.1}BEL + e_1$$

$$\text{Model II} \quad HDI = \alpha_2 + \beta_{1.2}DES + \beta_{2.2}EFE + \beta_{3.2}BEL + \beta_{4.2}PE + e_2$$

Keterangan :

HDI : *Human Development Index*

PE : Pertumbuhan Ekonomi

DES : Kinerja Keuangan berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

EFE : Kinerja Keuangan berupa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

DES : Kinerja Keuangan berupa Rasio Belanja

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien jalur

$e$  : *Error*

#### 3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah alat statistik yang berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai data penelitian, meliputi nilai minimum dan maksimum, *means*, median, dan standar deviasi serta menjadi tahap pertama yang dilakukan ketika pengujian hipotesis dan analisis data (Ghozali, 2013). Statistik deskriptif dalam penelitian digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan daerah berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, serta belanja terhadap *Human Development Index* dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi.

#### 3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan penggabungan antara data runtut waktu (*time series*) yang meliputi objek atau individu serta data silang (*cross section*) yang meliputi

responden dalam periode waktu tertentu (Caraka & Yasin, 2017). Penerapan data panel memiliki beberapa kelebihan, antara lain besarnya *degree of freedom* karena penyediaan data dalam skala banyak serta mampu mengatasi masalah akibat penghilangan variabel. Adapun regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Model ini digunakan dalam penelitian karena data yang digunakan termasuk ke dalam data *time series*, yaitu empat tahun dimulai dari tahun 2018 hingga 2021 dan *cross section*, yaitu di pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

#### 3.4.2.1 Penentuan Model Regresi

Terdapat metode yang diaplikasikan dalam menentukan estimasi model regresi data panel, meliputi *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* (Widarjono, 2007).

##### 3.4.2.1.1 Common Effect Model

*Common Effect Model* adalah teknik estimasi parameter model data panel paling sederhana, dilakukan dengan menggabungkan data runtut waktu dan data silang menjadi satu kesatuan dengan mengabaikan dimensi individu maupun waktu (Widarjono, 2007). Teknik ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Pendekatan yang sering digunakan dalam model ini adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS).

##### 3.4.2.1.2 Fixed Effect Model

*Fixed Effect Model* merupakan teknik yang memprediksikan adanya variasi *intersep* antar individu tetapi koefisien regresi (*slope*) antar individu dengan antar waktu tetap (Widarjono, 2007). Variabel *dummy* digunakan untuk metode teknik ini sehingga mengetahui perbedaan *intersep* antar individu melalui pendekatan model estimasi *Least Square Dummy Variables* (LSDV). Berbeda dengan LSDV yang melakukan estimasi tanpa pembobot (*no weighted*), *General Least Square* (GLS) menjadi alternatif lain dalam mengestimasi metode dengan pembobot (*cross section weight*). Pembobotan penting dilakukan untuk meminimalisir heterogenitas antar unit *cross section*.

#### 3.4.2.1.3 Random Effect Model

Ketidakpastian penggunaan model muncul ketika melakukan estimasi data panel dengan *Fixed Effect Model* melalui teknik variabel *dummy*. Masalah ini dapat diestimasi menggunakan variabel residual bernama *Random Effect Model*. Widarjono (2007) menyebutkan bahwa *Random Effect Model* memprediksikan kemungkinan perbedaan *intersep* antar individu yang ditunjukkan melalui variabel *random* atau stokastik. Teknik yang memperkirakan bahwa *error* mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series* menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Penggunaan teknik ini dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan (*degree of freedom*) tanpa mengurangi jumlahnya, sehingga hasil estimasi berupa parameter akan menjadi semakin efisien.

#### 3.4.2.2 Uji Kesesuaian Model

Penentuan kesesuaian model terbaik dalam menguji ketiga metode pada regresi data panel supaya dugaan yang diperoleh menjadi efisien dapat dilakukan dengan pengujian *Chow*, Pengujian *Hausman*, serta pengujian *Lagrange Multiplier* (Widarjono, 2007).

#### 3.4.2.2.1 Pengujian Chow

Pengujian *Chow* merupakan uji penentuan ketepatan model antara *Fixed Effect Model* dengan *Common Effect Model* dalam mengestimasi data panel (Widarjono, 2007). Dasar penggunaan pengujian yaitu asumsi bahwa setiap unit data silang tidak memiliki kesamaan perilaku. Adapun hipotesis dalam Pengujian *Chow* yaitu:

1. Nilai Probabilitas F (P-Value) < nilai signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ), keputusan  $H_0$  ditolak atau memilih *Fixed Effect Model*.
2. Nilai Probabilitas F (P-Value) > nilai signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ), keputusan  $H_0$  diterima atau memilih *Common Effect Model*.

#### 3.4.2.2.2 Pengujian Hausman

Pengujian *Hausman* merupakan uji perbandingan dalam memperoleh model terbaik pada regresi data panel antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* (Caraka & Yasin, 2017). Dasar penggunaan pengujian karena adanya unsur *trade off* pada model *Fixed Effect Model* yaitu hilangnya unsur *degree of freedom* dengan memasukkan variabel *dummy* dan *Random Effect Model*. Adapun hipotesis dalam pengujian *Hausman* adalah:

1. Nilai Probabilitas *Chi Squares* (P-Value) < nilai signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) atau nilai *Chi Squares* hitung > nilai *Chi Squares* tabel, keputusan  $H_0$  ditolak atau memilih *Fixed Effect Model*.
2. Nilai Probabilitas *Chi Squares* (P-Value) > nilai signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) atau nilai *Chi Squares* hitung < nilai *Chi Squares* tabel, keputusan  $H_0$  diterima atau memilih *Random Effect Model*.

#### 3.4.2.2.3 Pengujian Lagrange Multiplier

Pengujian *Lagrange Multiplier* merupakan uji perbandingan dalam memperoleh ketepatan model pada regresi data panel antara *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model* (Widarjono, 2007) . Pengujian yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan ini didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan sebesar jumlah variabel independen. Adapun hipotesis dalam pengujian *Lagrange Multiplier* yaitu:

1. Nilai Probabilitas *Chi Squares* (P-Value) < nilai signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ), keputusan  $H_0$  ditolak atau memilih *random effect model*.
2. Nilai Probabilitas *Chi Squares* (P-Value) > nilai signifikansi ( $\alpha = 5$ ), keputusan  $H_0$  diterima atau memilih *common effect model*.

#### 3.4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2013) pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menganalisis kelayakan model regresi di suatu penelitian sehingga memastikan bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan terkait perkiraan, konstan, serta tidak bias. Terdapat beberapa jenis pengujian, diantaranya:

#### 3.4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui kenormalan distribusi suatu data dalam penelitian (Widarjono, 2007). Model regresi dikatakan baik ketika memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Adapun penelitian menggunakan pengujian *jarque-bera* dengan pengambilan keputusan data berdistribusi normal ketika nilai probabilitas dari statistik *jarque-bera* lebih besar dari 0.05 (Widarjono, 2007).

#### 3.4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari pengujian multikolinearitas adalah memvalidasi hubungan antar variabel bebas dalam model regresi, dimana model yang baik terjadi ketika variabel bebas tidak saling berkorelasi (Widarjono, 2007). Variabel bebas yang saling berkorelasi mengakibatkan nilai hubungan sama dengan nol atau dikatakan variabel menjadi tidak ortogonal. Batas ukuran tertentu dalam mendeteksi multikolinearitas antara lain *Variance Inflation Factors* (VIF) dan korelasi berpasangan. Adapun pengujian dilakukan melalui metode *Variance Inflation Factors* (VIF), dengan pengambilan keputusan tidak terjadi multikolinearitas ketika nilai VIF tidak melebihi angka 10,00 (Widarjono, 2007).

### 3.4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah residual dari model regresi memiliki varians yang konstan atau tidak (Widarjono, 2007). Homoskedastisitas terjadi ketika varian dari residual antar pengamatan tetap dan dikatakan sebagai suatu model regresi lebih baik dibanding dengan heteroskedastisitas, yang dapat dideteksi melalui metode *grafik*, *glesjer*, *goldfield-quandt*, *uji park*, korelasi *spearman*, *Breusch-pagan* dan *white*. Adapun penelitian menggunakan uji *Glejser* dengan pengambilan keputusan tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas ketika nilai probabilitas *Chi Square* lebih besar dari taraf signifikansi (Widarjono, 2007). Ketika terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian maka dilakukan pengujian ulang menggunakan pembobotan melalui metode *Generalized Least Squares* (GLS). Selanjutnya, tidak diperlukan pengujian autokorelasi kembali sebab metode GLS telah mengatasi persoalan heteroskedastisitas dan autokorelasi.

### 3.4.2.3.4 Uji Autokorelasi

Bentuk pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji korelasi antara kesalahan residual periode sekarang dengan kesalahan di periode sebelumnya. Uji autokorelasi suatu model regresi dapat diidentifikasi menggunakan besaran nilai dari pengujian *Durbin-Watson* dengan menganalisis nilai  $DW_{hitung}$  dengan  $DW_{tabel}$  (Widarjono, 2007). Pengambilan keputusan didasarkan pada hipotesis sebagai berikut:

1. Apabila  $0 < d < dL$ , keputusan  $H_0$  ditolak atau tidak ada autokorelasi positif.
2. Apabila  $dL < d < dU$ , keputusan  $H_0$  tidak ada keputusan atau tidak ada autokorelasi positif.
3. Apabila  $4-dL < d < 4$ , keputusan  $H_0$  ditolak atau tidak ada autokorelasi negatif.
4. Apabila  $4-dU < d < 4-dL$ , keputusan  $H_0$  tidak ada keputusan atau tidak ada autokorelasi negatif.
5.  $dU < d < 4-dU$ , keputusan  $H_0$  diterima atau tidak ada autokorelasi.



#### **3.4.2.4 Uji Kelayakan Model**

Pengujian kelayakan model berguna dalam mengidentifikasi model regresi untuk melihat kelayakan data sehingga dapat dijadikan penjelasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dapat dilakukan melalui pengujian hipotesis dan pengujian determinasi  $R^2$ .

##### **3.4.2.4.1 Pengujian Hipotesis**

Menurut Widarjono (2007), pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis terdiri dari uji parsial (uji t) yang menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, dan uji simultan (uji F) yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen secara bersama-sama. Menurut Widarjono (2007) , dasar pengambilan keputusan adalah membandingkan nilai *probability* terhadap  $\alpha$  0.05, yaitu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen ketika nilai *probability* kurang dari  $\alpha$  0.05. Namun, apabila nilai *probability* melebihi  $\alpha$  0.05 artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### 3.4.2.4.2 Pengujian Koefisien Determinasi

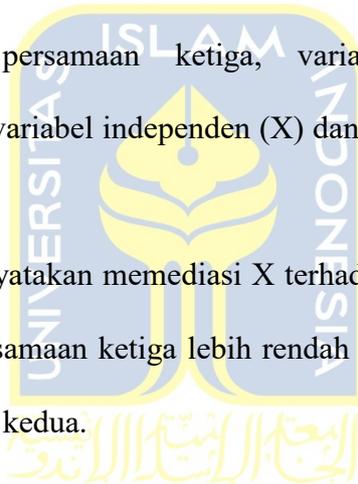
Uji koefisien determinasi merupakan pengujian dengan tujuan mengetahui besarnya variabel dependen dalam menerangkan variabel independen. Apabila hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai mendekati satu maka model regresi data panel dikatakan tepat digunakan. Sebaliknya, nilai uji mendekati nol bermakna bahwa model regresi data panel kurang tepat digunakan dalam menilai penelitian (Widarjono, 2007).

#### 3.4.2.5 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Teknik analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis linear berganda sehingga dasar perhitungan koefisien jalur menggunakan analisis korelasi dan regresi (Ghozali, 2013) . Analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk menguraikan hubungan secara langsung maupun tidak langsung mengenai kausalitas antar variabel yang didasarkan pada *standardized coefficients beta* hasil regresi persamaan struktural dalam model jalur (Deswanto et al., 2017) . Pengujian dilakukan menggunakan metode *causal step* yang dikembangkan oleh

Baron & Kenny (1986). Adapun syarat yang harus terpenuhi untuk membuktikan variabel mediasi adalah sebagai berikut:

1. Pada model persamaan pertama, variabel dependen ( $Y_1$ ) harus mempengaruhi variabel independen ( $X$ ) secara signifikan, artinya koefisien  $a \neq 0$ .
2. Pada model persamaan kedua, variabel dependen ( $Y_2$ ) harus mempengaruhi variabel independen ( $X$ ) secara signifikan, artinya koefisien  $b \neq 0$ .
3. Pada model persamaan ketiga, variabel dependen ( $Y_2$ ) harus mempengaruhi variabel independen ( $X$ ) dan ( $Y_1$ ) secara signifikan, artinya koefisien  $c \neq 0$ .
4. Variabel  $Y_1$  dinyatakan memediasi  $X$  terhadap  $Y_2$  ketika nilai koefisien  $c'$  pada model persamaan ketiga lebih rendah dibandingkan nilai koefisien  $c$  pada persamaan kedua.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Adapun pembahasan dalam penelitian meliputi hasil analisis uji pengaruh kinerja keuangan daerah yang diinterpretasikan melalui rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, serta rasio belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan *Human Development Index*. Penelitian ini memanfaatkan data yang terpublikasi pada instansi terkait yaitu *website* resmi

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah serta data yang telah diolah melalui perhitungan manual dari Laporan Realisasi Anggaran daerah pada *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun anggaran 2018 hingga 2021. Populasi dalam penelitian meliputi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa tengah tahun 2018 hingga 2021 dengan jumlah sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota. Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* yang dipaparkan melalui tabel berikut:

**Tabel 4. 1**

**Data Sampel**

No	Kriteria	Jumlah
1.	Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah	29
2.	Kota di Provinsi Jawa Tengah	6
Jumlah sampel yang diperoleh		35
Jumlah sampel pengamatan = 35 sampel x 4 tahun		140

## 4.2 Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan alat statistik yang berfungsi untuk memberikan analisis, deskripsi, serta gambaran data variabel secara umum. Statistik deskriptif dalam penelitian meliputi nilai *minimum* dan *maximum*, *mean*, dan standar deviasi dari variabel independen kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal (DES), rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (EFE), rasio

belanja (BEL), variabel mediasi pertumbuhan ekonomi (PE), serta variabel dependen *Human Development Index* (HDI).

**Tabel 4. 2**

**Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	DES	EFE	BEL	PE	HDI
<b>Mean</b>	17.98205	110.3801	81.55208	2.911963	72.38629
<b>Median</b>	16.16604	107.9973	81.83000	3.811209	71.57500
<b>Maximum</b>	49.47117	174.6595	91.66657	6.810000	83.60000
<b>Minimum</b>	8.994211	72.23693	71.46020	-10.28000	65.67000
<b>Std. Dev.</b>	7.022926	17.07459	4.546139	3.236208	4.400833
<b>Skewness</b>	2.216794	0.636035	-0.202929	-0.998575	0.939585
<b>Kurtosis</b>	9.438098	3.997090	2.377617	3.522836	3.354188
<b>Jarque-Bera</b>	356.4505	15.23871	3.220475	24.86149	21.33094
<b>Probability</b>	0.000000	0.000491	0.199840	0.000004	0.000023
<b>Sum</b>	2517.487	15453.21	11417.29	407.6748	10134.08
<b>Sum Sq. Dev.</b>	6855.687	40524.29	2872.765	1455.752	2692.059
<b>Observations</b>	140	140	140	140	140

Sumber: Hasil olah data Eviews 12

Berlandaskan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2, tertera 140 observasi data di setiap indikator penelitian yang digunakan untuk sampel penelitian.

Berikut merupakan paparan terkait hasil statistik deskriptif variabel penelitian:

1. Variabel independen kinerja keuangan daerah berupa rasio derajat desentralisasi fiskal (DES) memiliki nilai *maximum* sebesar 49.47% pada Kota Semarang periode 2021 serta nilai *minimum* sebesar 8.99% pada Kabupaten Blora periode 2019. Selanjutnya, nilai rata-rata sebesar 17.98% yang menunjukkan kurangnya kemampuan kinerja keuangan pemerintah

daerah. Adapun nilai *median* sebesar 16.17% serta standar deviasi sebesar 7.02%.

2. Variabel independen kinerja keuangan daerah berupa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (EFE) memiliki nilai *maximum* sebesar 174.66% pada Kabupaten Sragen periode 2021 serta nilai *minimum* sebesar 72.24% pada Kabupaten Pekalongan periode 2021. Selanjutnya, nilai rata-rata sebesar 110.38% yang berarti secara umum pemerintah daerah dianggap telah efektif selama menggunakan Pendapatan Asli Daerah. Adapun nilai *median* sebesar 107.99% serta standar deviasi sebesar 17.07%.
3. Variabel independen kinerja keuangan daerah berupa rasio belanja (BEL) memiliki nilai *maximum* sebesar 91.67% pada Kabupaten Kendal pada periode 2021 dan nilai *minimum* sebesar 71.46% pada Kabupaten Blora periode 2018. Selanjutnya, nilai rata-rata sebesar 81.55%, nilai *median* sebesar 81.83%, serta standar deviasi sebesar 4.54%.
4. Variabel mediasi pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki nilai *maximum* sebesar 6.81% pada Kota Semarang periode 2019 dan nilai *minimum* sebesar -10.28% pada Kabupaten Cilacap periode 2020. Selanjutnya, nilai rata-rata sebesar 2.91%, nilai *median* sebesar 3.81%, serta standar deviasi sebesar 3.27%.
5. Variabel dependen *Human Development Index* (HDI) memiliki nilai *maximum* sebesar 83.60 pada Kota Salatiga periode 2021 dan nilai *minimum* sebesar 65.67 pada Kabupaten Pemasang periode 2018.

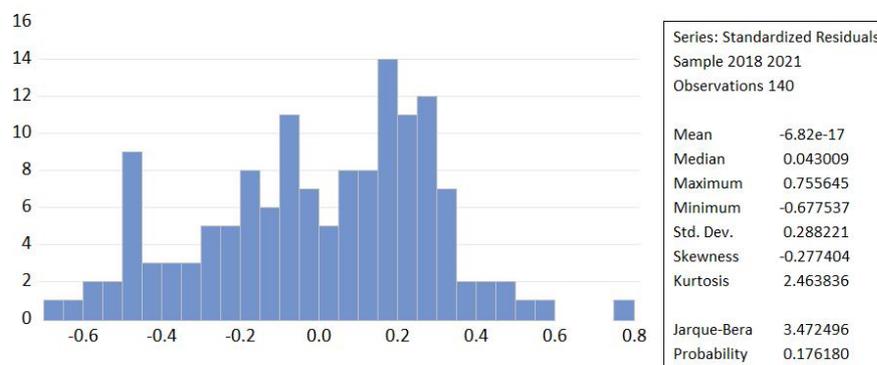
Selanjutnya, nilai rata-rata sebesar 72.39 yang berarti rata-rata HDI Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori sedang karena berada di angka  $51 < IPM < 79$ . Adapun nilai *median* sebesar 71.58 serta standar deviasi sebesar 4.40.

#### 4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan persyaratan statistik dengan maksud untuk meminimalisir keadaan bias atas hasil penelitian. Pengujian asumsi klasik dalam regresi linear meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Berikut merupakan paparan dari masing-masing pengujian:

##### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui sebaran data penelitian normal atau menyimpang (Widarjono, 2007). Penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera* dengan pengambilan keputusan data berdistribusi normal ketika nilai *probability Jarque-Bera*  $> 0.05$ . Adapun nilai pengujian ditunjukkan pada tabel berikut:



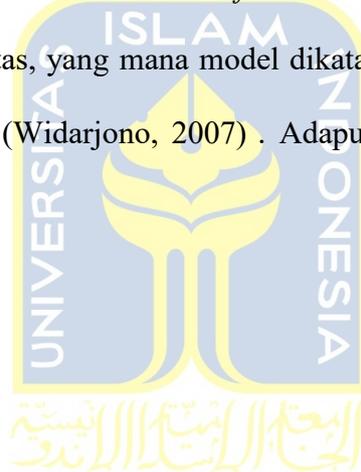
Sumber: Hasil olah data Eviews 12

### Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada gambar 4.1, ditemukan nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,18 yang berarti nilai melebihi tingkat signifikansi 0.05. Oleh karena itu, data diasumsikan terdistribusi secara normal.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa antar variabel independen tidak saling berelasi yang dapat menyebabkan biasnya penelitian. Penelitian ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk mendeteksi masalah multikolinearitas, yang mana model dikatakan bermasalah jika nilai VIF melebihi angka 10,00 (Widarjono, 2007) . Adapun nilai pengujian ditunjukkan pada tabel berikut:



**Tabel 4. 3**

#### Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	77.26598	1250.958	NA
DES	0.001286	7.749745	1.019272
EFE	2.834130	1011.362	1.059183
BEL	0.003347	361.4679	1.111819
PE	0.006712	2.051462	1.129984

Sumber: Hasil olah data Eviews 12

Temuan uji multikolinearitas memastikan bahwa nilai VIF tidak melebihi angka 10.00, sehingga dikatakan bahwa antar variabel independen tidak mengalami masalah multikolinearitas. Hasil yang tertera memperlihatkan bahwa variabel independen dalam model regresi tidak memiliki korelasi yang kuat.

#### 4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian guna mengetahui adanya varians yang konstan atau tidak pada residual dari model yang terbentuk. Pengujian ini menggunakan uji *glejser* dengan pengambilan keputusan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada sebaran data ketika nilai *probability* melebihi 0.05. Adapun nilai pengujian ditunjukkan pada tabel berikut:



**Tabel 4. 4**

#### **Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.767401	5.479582	0.505039	0.6144
DES	0.030940	0.022352	1.384218	0.1686
EFE	0.109629	1.049453	0.104463	0.9170
BEL	-0.018584	0.036063	-0.515326	0.6072
PE	-0.026584	0.051072	-0.520520	0.6036

Sumber: Hasil olah data Eviews 12

Berdasarkan hasil keluaran pada tabel 4.4 terlihat bahwa nilai *probability* untuk setiap variabel independen menunjukkan hasil lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. Hasil yang tertera diartikan bahwa sebaran data tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

#### 4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui korelasi antar variabel gangguan satu observasi dengan observasi lain. Pengujian yang dilakukan melalui uji *Durbin-Watson* (D-W) dapat menggambarkan apakah terjadi kesalahan residual pada periode sekarang dengan periode sebelumnya.



**Tabel 4. 5**

#### **Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.521647	Mean dependent var	-1.48E-14
Adjusted R-squared	0.500067	S.D. dependent var	2.897987
S.E. of regression	2.049049	Akaike info criterion	4.321336
Sum squared resid	558.4143	Schwarz criterion	4.468418
Log likelihood	-295.4935	Hannan-Quinn criter.	4.381106
F-statistic	24.17284	Durbin-Watson stat	2.032150
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah data Eviews 12

Hasil uji autokorelasi yang tertera pada tabel 4.5 memperlihatkan nilai *Durbin-Watson* yang menunjukkan hasil 2.03. Sedangkan nilai  $d_L$  dalam pengujian adalah 1.66 dan nilai  $d_U$  dalam pengujian adalah 1.78. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil nilai terletak diantara  $d_U < d < 4 - d_U$ , yang diartikan tidak terdapat adanya autokorelasi.

### 4.2.3 Analisis Regresi Data Panel

Sebelum melakukan analisis regresi, penting untuk menentukan salah satu pendekatan terbaik dari *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, atau *Random Effect Model* yang dilakukan melalui pengujian *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange Multiplier Test* (Widarjono, 2007). Berikut merupakan paparan dari masing-masing pengujian:



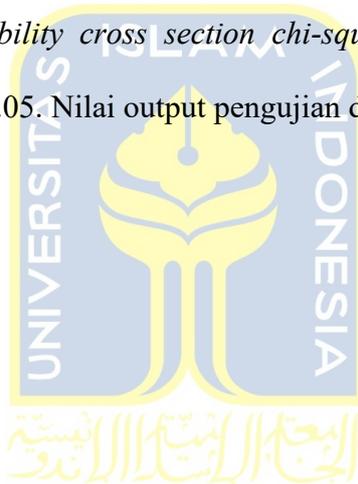
#### 4.2.3.1 Model Struktural (1) Variabel Kinerja Keuangan berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ( $X_1$ ), Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ), dan Rasio Belanja ( $X_3$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )

Analisis model regresi persamaan (1) dilakukan untuk mengetahui pengaruh hubungan dari variabel independen kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan rasio belanja terhadap variabel mediasi pertumbuhan ekonomi.

#### 4.2.3.1.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel

##### a) Pengujian *Chow*

Pengujian *Chow* digunakan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan hasil output antara kedua metode untuk dipilih serta digunakan dalam penelitian selanjutnya. Ketika *probability cross section chi-square* menunjukkan nilai melebihi 0.05, keputusan model yang baik adalah *Common Effect*. Sebaliknya, *Fixed Effect* akan dipilih ketika *probability cross section chi-square* menunjukkan nilai lebih rendah dari 0.05. Nilai output pengujian ditunjukkan pada tabel berikut:



**Tabel 4. 6**

#### **Hasil Pengujian Chow untuk Model Struktural (1)**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

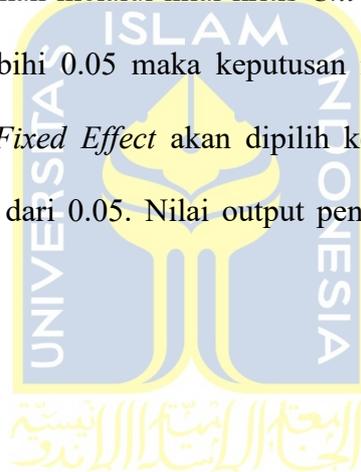
Effects Test	Statistic	d.f. Prob.
Cross-section F	1.587099	(34,102)0.0402
Cross-section Chi-square	59.448959	340.0044

Sumber: Hasil olah data Eviews 12

Nilai *probability cross section chi-square* menurut tabel 4.6 menunjukkan hasil 0.004. Artinya, penggunaan metode yang lebih baik adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya, dilakukan kembali pengujian sehingga diperoleh model yang paling tepat dalam pengujian.

b) Pengujian *Hausman*

Pengujian *Hausman* digunakan untuk memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Keputusan dipertimbangkan melalui nilai kritis *Chi-Square* 0.05, ketika nilai *Chi-Square* melebihi 0.05 maka keputusan model adalah *Random Effect*. Sebaliknya, *Fixed Effect* akan dipilih ketika nilai menunjukkan hasil lebih rendah dari 0.05. Nilai output pengujian ditunjukkan pada tabel berikut:



**Tabel 4. 7**

**Hasil Pengujian Hausman untuk Model Struktural (1)**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

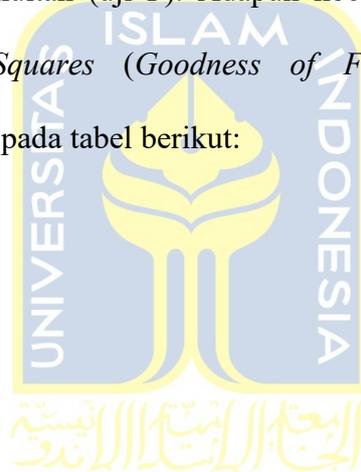
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	40.504232	3	0.0000

Sumber: Hasil olah data Eviews 12

Nilai statistik Hausman menurut tabel 4.7 menunjukkan hasil 0.000, lebih rendah dari 0.05. Artinya, penggunaan model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

#### 4.2.3.1.2 Penilaian Model Regresi Data Panel

Setelah menentukan model regresi data panel, tahap berikutnya adalah penilaian model regresi data panel yang meliputi uji hipotesis serta koefisien determinasi. Uji hipotesis terdiri dari uji parsial (uji t) serta uji simultan (uji F). Adapun koefisien determinasi dinotasikan dengan *R-Squares (Goodness of Fit)*. Nilai output pengujian ditunjukkan pada tabel berikut:



**Tabel 4. 8**

#### **Hasil Penilaian Regresi Data Panel Model Struktural (1)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.10457	13.32995	-0.983093	0.3279
DES (H <sub>1</sub> )	-0.236118	0.147090	-1.605258	0.1115
EFE (H <sub>2</sub> )	13.21150	2.743771	4.815087	0.0000
BEL (H <sub>3</sub> )	-0.511702	0.088633	-5.773243	0.0000

\*Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Effects Specification

---



---

 Cross-section fixed (dummy variables)
 

---



---

Root MSE	2.453212	R-squared	0.421224
Mean dependent var	2.911963	Adjusted R-squared	0.211275
S.D. dependent var	3.236208	S.E. of regression	2.874081
Akaike info criterion	5.175531	Sum squared resid	842.5550
Schwarz criterion	5.973977	Log likelihood	-324.2872
Hannan-Quinn criter.	5.499995	F-statistic	2.006322
Durbin-Watson stat	2.977921	Prob(F-statistic)	0.003267

---



---

Sumber: Hasil olah data Eviews 12

Dari hasil penilaian regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* pada tabel 4.8, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PE = -13.10457 - 0.236118DES + 13.2115EFE - 0.511702BEL$$

Adapun analisis berdasarkan persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta

Nilai konstanta sebesar -13.10457 mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar -13.10457 apabila variabel independen kinerja keuangan berupa rasio desentralisasi fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan belanja konstan.

2. Rasio derajat desentralisasi fiskal

Nilai koefisien kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal (DES) sebesar -0.236118 menunjukkan bahwa setiap kenaikan rasio derajat desentralisasi fiskal

sebesar 1 satuan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -0.236118 dengan asumsi nilai variabel independen lain konstan. Adapun pengujian parsial (uji T) pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki probabilitas 0.1115. Artinya, rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki nilai probabilitas  $> 0.05$  dan disimpulkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 3. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Nilai koefisien kinerja keuangan berupa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (EFE) sebesar 13.21150 menunjukkan bahwa setiap kenaikan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 satuan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 13.21150 dengan asumsi nilai variabel independen lain konstan. Adapun pengujian parsial (uji T) pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki probabilitas 0.0000. Artinya, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai probabilitas  $< 0.05$  dan disimpulkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### 4. Rasio belanja

Nilai koefisien kinerja keuangan berupa rasio belanja (BEL) sebesar  $-0.511702$  menunjukkan bahwa setiap kenaikan rasio belanja sebesar 1 satuan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar  $-0.511702$  dengan asumsi nilai variabel independen lain konstan. Adapun pengujian parsial (uji T) pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , rasio belanja memiliki probabilitas 0.0000. Artinya, rasio belanja memiliki nilai probabilitas  $< 0.05$  dan disimpulkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio belanja berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### 5. Uji Simultan (Uji F)

Sesuai hasil penilaian yang tertera dalam tabel 4.8, memperlihatkan bahwa nilai *probability* F-statistik 0.003 lebih rendah dibanding tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ . Kesimpulannya, seluruh variabel independen kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, serta rasio belanja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan.

#### 6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa uji koefisien determinasi menghasilkan nilai *R-Squares* sebesar 0.4212 atau 42,12%. Hal ini menandakan bahwa kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, serta rasio belanja mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 42,12%. Sedangkan 57,88% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

#### **4.2.3.2 Model Struktural (2) Variabel Kinerja Keuangan berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ( $X_1$ ), Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ ), Rasio Belanja ( $X_3$ ), dan Variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ) terhadap *Human Development Index* ( $Y_2$ )**

Analisis model regresi persamaan (2) dilakukan untuk mengetahui pengaruh hubungan dari variabel independen kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio belanja, serta pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen *Human Development Index*.

##### **4.2.3.2.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel**

###### a) Pengujian *Chow*

**Tabel 4.9**

**Hasil Pengujian *Chow* untuk Model Struktural (2)**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	297.349876	(34,101)	0.0000
Cross-section Chi-square	646.252618	34	0.0000

Sumber: Hasil olah data Eviews 12

Nilai *probability cross section chi-square* menurut tabel 4.9 menunjukkan hasil 0.000. Artinya, penggunaan metode yang lebih baik adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya, dilakukan kembali pengujian sehingga diperoleh model yang paling tepat dalam pengujian.

b) Pengujian *Hausman*

**Tabel 4. 10**

**Hasil Pengujian Hausman untuk Model Struktural (2)**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	46.212609	4	0.0000

Sumber: Hasil olah data Eviews 12

Nilai statistik Hausman menurut tabel 4.10 menunjukkan hasil 0.000, lebih rendah dari 0.05. Artinya, penggunaan model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

#### 4.2.3.2.2 Penilaian Model Regresi Data Panel

Setelah menentukan model regresi data panel, tahap berikutnya adalah penilaian model regresi data panel yang meliputi pengujian hipotesis berupa uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F), serta pengujian koefisien determinasi yang dinotasikan dengan *R-Squares* (*Goodness of Fit*). Nilai output pengujian ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 11**

**Hasil Penilaian Regresi Data Panel Model Struktural (2)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.55715	1.575611	41.60744	0.0000
DES (H <sub>4</sub> )	0.036351	0.017522	2.074661	0.0406
EFE (H <sub>5</sub> )	0.448995	0.357599	1.255582	0.2122
BEL (H <sub>6</sub> )	0.051061	0.012011	4.251305	0.0000
PE (H <sub>7</sub> )	-0.032799	0.011649	-2.815721	0.0059

\*Dependent Variable: *Human Development Index*

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.287189	R-squared	0.995711
Mean dependent var	72.38629	Adjusted R-squared	0.994097
S.D. dependent var	4.400833	S.E. of regression	0.338121
Akaike info criterion	0.899794	Sum squared resid	11.54689
Schwarz criterion	1.719251	Log likelihood	-23.98557
Hannan-Quinn criter.	1.232797	F-statistic	617.0075
Durbin-Watson stat	2.516680	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil olah data Eviews 12

Sesuai hasil penilaian regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* pada tabel 4.11, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{HDI} = 65.55715 + 0.036351\text{DES} + 0.448995\text{EFE} + 0.051061\text{BEL} - 0.032799\text{PE}$$

Adapun analisis berdasarkan persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Konstanta

Nilai konstanta sebesar 65.55715 mengindikasikan bahwa *Human Development Index* akan mengalami peningkatan sebesar 65.55715 apabila variabel independen kinerja keuangan berupa rasio desentralisasi fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, belanja, serta pertumbuhan ekonomi konstan.

#### 2. Rasio derajat desentralisasi fiskal

Nilai koefisien kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal (DES) sebesar 0.036351 menunjukkan bahwa setiap kenaikan rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 1 satuan berdampak pada peningkatan *Human Development Index* sebesar 0.036351 dengan asumsi nilai variabel independen lain konstan. Adapun pengujian parsial (uji T) pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki probabilitas 0.0405. Artinya, rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki nilai probabilitas < 0.05 dan disimpulkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio

derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap *Human Development Index*.

### 3. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Nilai koefisien kinerja keuangan berupa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (EFE) sebesar 0.448995 menunjukkan bahwa setiap kenaikan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 satuan berdampak pada peningkatan *Human Development Index* sebesar 0.448995 dengan asumsi nilai variabel independen lain konstan. Adapun pengujian parsial (uji T) pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki probabilitas 0.2122. Artinya, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai probabilitas  $> 0.05$  dan disimpulkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Human Development Index*.

### 4. Rasio belanja

Nilai koefisien kinerja keuangan berupa rasio belanja (BEL) sebesar 0.051061 menunjukkan bahwa setiap kenaikan rasio belanja sebesar 1 satuan berdampak pada peningkatan *Human Development Index* sebesar 0.051061 dengan asumsi nilai variabel independen lain konstan. Adapun pengujian parsial (uji T) pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , rasio belanja

memiliki probabilitas 0.0000. Artinya, rasio belanja memiliki nilai probabilitas  $< 0.05$  dan disimpulkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio belanja berpengaruh positif signifikan terhadap *Human Development Index*.

#### 5. Pertumbuhan Ekonomi

Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar -0.032799 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 satuan berdampak pada penurunan *Human Development Index* sebesar -0.032799 dengan asumsi nilai variabel independen lain konstan. Adapun pengujian parsial (uji T) pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ , pertumbuhan ekonomi memiliki probabilitas 0.0059. Artinya, BEL memiliki nilai probabilitas  $< 0.05$  dan disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap *Human Development Index*.

#### 6. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil penilaian yang tertera dalam tabel 4.11, diketahui bahwa nilai *probability* F-statistik 0.000 kurang dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio belanja, serta

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap *Human Development Index* secara simultan.

#### 6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

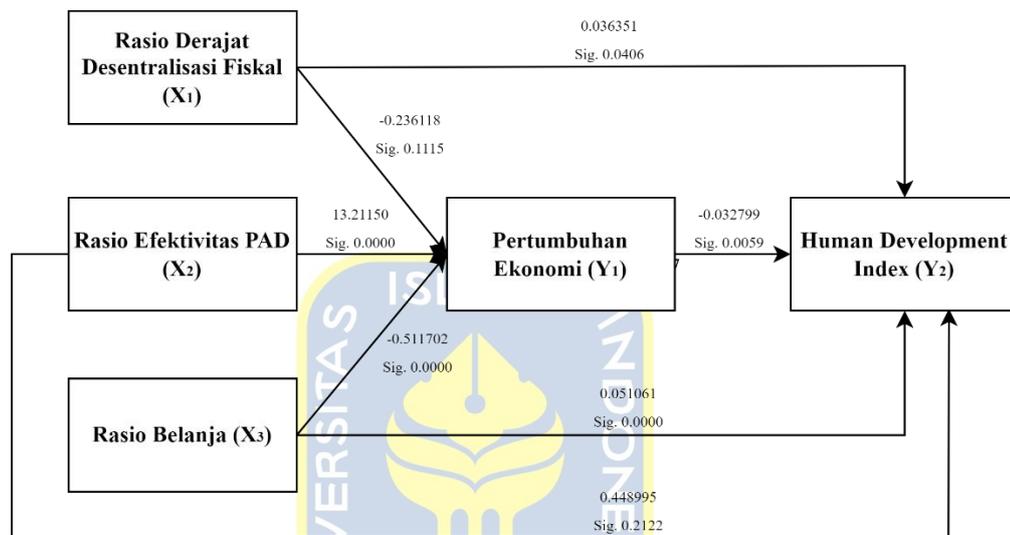
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa uji koefisien determinasi menghasilkan nilai *R-Squares* sebesar 0,995711 atau 99,57%.

Hal ini menandakan bahwa kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio belanja, serta pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan *Human Development Index* sebesar 99,57%. Sedangkan 0,43% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

#### 4.2.4 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur atau dikenal sebagai *path analysis* dipergunakan untuk menguraikan pola hubungan seperangkat variabel independen terhadap variabel dependen sehingga mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung (Riduwan & Kuncoro, 2017). Adapun pengujian dilakukan untuk memperoleh gambaran tingkat intensitas variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi dalam mempengaruhi kinerja keuangan daerah berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, rasio belanja sebagai variabel independen terhadap *Human Development Index* sebagai variabel dependen secara tidak langsung.

Penelitian ini mengimplementasikan dua model struktural dalam analisis jalur, sehingga untuk mengukur koefisien jalur dilakukan analisis regresi sebanyak dua tahap. Setelahnya, dibentuk kedua model struktural dalam grafik analisis jalur sebagai berikut:



**Gambar 4. 2 Diagram Jalur Hubungan Kausal Variabel Independen, Variabel Mediasi, dan Variabel Dependen**

#### 4.2.4.1 Uji Variabel Mediasi

Adapun pengujian pengaruh variabel mediasi dapat dilihat dari hasil yang terdapat pada gambar 4.2, yaitu:

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $0.1115 > \alpha 0.05$ ), rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Human Development Index* ( $0.0406 < \alpha 0.05$ ), serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap *Human Development Index* ( $0.0059 < \alpha 0.05$ ). Artinya, pertumbuhan

ekonomi tidak dapat memediasi hubungan rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap *Human Development Index*.

2. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $0.0000 < \alpha < 0.05$ ), rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Human Development Index* ( $0.2122 > \alpha < 0.05$ ), dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap *Human Development Index* ( $0.0059 < \alpha < 0.05$ ). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memediasi hubungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap *Human Development Index*.
3. Rasio belanja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ( $0.0000 < \alpha < 0.05$ ), rasio belanja berpengaruh signifikan terhadap *Human Development Index* ( $0.0059 < \alpha < 0.05$ ), dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap *Human Development Index* ( $0.0059 < \alpha < 0.05$ ). Artinya, pertumbuhan ekonomi dapat memediasi hubungan rasio belanja terhadap *Human Development Index*.

### **4.3 Pembahasan Uji Hipotesis**

#### **4.3.1 Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hipotesis pertama merumuskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sesuai hasil pengujian pada tabel 4.8 menunjukkan nilai

koefisien sebesar -0.236118 serta nilai signifikansi sebesar 0.1115, melebihi 0.05 yang mengartikan rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Desentralisasi fiskal menjelaskan pengaruh perolehan Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah, sehingga semakin tinggi desentralisasi fiskal maka daerah dapat secara mandiri melakukan aktivitas produksi barang dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sistem ini melibatkan peran penting pemerintah daerah dalam menyalurkan dana kepada sektor ekonomi secara efisien dengan alasan pemerintah daerah mengetahui secara tepat kebutuhan daerah daripada pemerintah pusat. Akan tetapi, pertumbuhan tidak selalu menuju ke arah yang kuat, sebab timbulnya kesenjangan antar daerah khususnya pada tingkat kapasitas pembangunan dan sumber daya. Saputra (2013) mengatakan bahwa di negara berkembang dampak derajat desentralisasi tidak begitu terasa dikarenakan belum tercukupinya sumber daya ekonomi serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pemerintah daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan masih kurangnya kemampuan penyelenggaraan desentralisasi yang ditandai dengan angka derajat desentralisasi secara rata-rata berada pada kisaran 17.98%, sehingga Provinsi Jawa Tengah dikatakan belum mandiri secara fiskal dan masih bergantung kepada dana desentralisasi yang pada akhirnya belum dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut didukung penelitian oleh Dwiyandari & Badera (2018) yang menyatakan kinerja keuangan tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karenina et al. (2021) juga menemukan hubungan tidak signifikan rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **4.3.2 Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hipotesis kedua merumuskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sesuai hasil keluaran pada tabel 4.8 terlihat nilai koefisien adalah 13.212 dan nilai signifikansi adalah 0.000, lebih rendah dari 0.05, sehingga membuktikan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bermakna semakin tinggi tingkat kesesuaian target dan realisasi anggaran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Rasio efektivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan (Utami et al., 2020) . Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah berarti pemerintah daerah memiliki lebih banyak dana yang digunakan untuk menggali potensi daerah sehingga secara efektif mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat rasio efektivitas selama periode anggaran 2018-2021 di Provinsi Jawa tengah menunjukkan rata-rata persentase 110.38% yang mengindikasikan kemampuan yang efektif dalam mengelola penerimaan

Pendapatan Asli Daerah sesuai target, sehingga efektivitas Pendapatan Asli Daerah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Utami et al. (2020) dan Azwandi et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan.

#### **4.3.3 Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hipotesis ketiga merumuskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sesuai temuan penelitian pada tabel 4.8 memperlihatkan nilai koefisien sebesar -0.512 serta nilai signifikansi sebesar 0.000, lebih rendah dari 0.05 yang membuktikan bahwa rasio belanja berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah menurunkan laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Deswanto et al. (2017), ketepatan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan porsi belanja daerah dapat memicu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Pembagian pengeluaran pemerintah sendiri dipergunakan untuk mendanai operasional pemerintahan serta sebagian lainnya digunakan untuk pendanaan aktivitas pembangunan. Pengeluaran dana untuk kegiatan operasional akan menumbuhkan permintaan barang dan jasa sehingga terjadi suatu aktivitas ekonomi. Selanjutnya, pengeluaran dana untuk pembangunan infrastruktur daerah

dapat meningkatkan daya saing daerah dan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi daerah tersebut.

Selama periode anggaran 2018-2021, porsi belanja operasi dibanding keseluruhan belanja daerah berada pada angka 81.55%. Besarnya porsi belanja operasi dibandingkan belanja modal menunjukkan bahwa belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya berkualitas. Hal tersebut terjadi dikarenakan sebagian besar belanja operasional dialokasikan untuk belanja pegawai dan belum secara optimal diarahkan pada program-program pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong aktivitas ekonomi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan Bahari & Nugroho (2019) dan Yanto & Astuti (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan belanja pegawai berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

#### **4.3.4 Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap *Human Development Index***

Hipotesis keempat merumuskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap *Human Development Index*. Sesuai temuan penelitian pada tabel 4.11 memperlihatkan nilai koefisien sebesar 0.036 serta nilai signifikansi 0.041, lebih rendah dari tingkat signifikansi 0.05 sehingga terbukti bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap *Human Development Index* pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Artinya, kinerja

keuangan yang dilihat melalui derajat desentralisasi fiskal mampu meningkatkan angka *Human Development Index*.

Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kesanggupan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan (Bailusy, 2019) . Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah adalah melihat perolehan Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan dana daerah yang pada akhirnya dapat digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan layanan publik sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui angka *Human Development Index* yang meningkat.

Rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal pada Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2018 hingga 2021 adalah 17.98%, yang mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai kegiatan perekonomian dan pemerintahannya. Perolehan ini mampu memberikan perkembangan kepada daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan teori federalisme fiskal oleh Musgrave (1959) mengenai penerapan desentralisasi fiskal suatu daerah secara baik akan meningkatkan pelayanan publik sehingga mempengaruhi peningkatan *Human Development Index*.

Hasil ini didukung oleh penelitian Indramawan (2018) dan Azwandi et al. (2022) mengenai hubungan positif signifikan antara rasio desentralisasi fiskal

dengan *Human Development Index*. (Harliyani & Haryadi (2016) serta Sari & Riharjo (2020) juga menemukan hubungan signifikan rasio derajat desentralisasi fiskal terhadap *Human Development Index*.

#### **4.3.5 Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap *Human Development Index***

Hipotesis kelima merumuskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap *Human Development Index*. Sesuai temuan pada tabel 4.11 memperlihatkan nilai koefisien adalah 0.449 serta nilai signifikansi 0.212, melebihi tingkat signifikansi 0.05 sehingga terbukti bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Human Development Index* pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Artinya, kinerja keuangan yang dilihat melalui efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi angka *Human Development Index*.

Kinerja dikatakan efektif ketika pemerintah daerah mampu memakai keseluruhan perolehan Pendapatan Asli Daerah untuk menjalankan kegiatannya sesuai target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Sari & Riharjo, 2020). Perolehan Pendapatan Asli Daerah harus dialokasikan secara baik untuk melakukan kegiatan program penyediaan layanan publik, terutama dalam bidang yang mempengaruhi standar layak hidup masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018 hingga 2021 menunjukkan rata-rata persentase 110.38%, yang berarti Pendapatan Asli Daerah telah secara keseluruhan telah direalisasikan melebihi target yang dianggarkan. Namun, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang tinggi tidak mempengaruhi angka *Human Development Index* dapat disebabkan karena fokus perolehan Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk pengelolaan aset dan belum secara optimal dialokasikan pada kepentingan masyarakat dan pembangunan layanan publik. Artinya, efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang tinggi tidak berpengaruh terhadap layanan publik yang lebih baik, sehingga *Human Development Index* tidak terpengaruh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gousario & Dharmastuti (2015), Harliyani & Haryadi (2016) dan Tandiayu & Sombolayuk (2021) yang menyatakan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap *Human Development Index*.

#### **4.3.6 Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Belanja terhadap *Human Development Index***

Hipotesis keenam merumuskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio belanja berpengaruh positif terhadap *Human Development Index*. Sesuai hasil pengujian pada tabel 4.11 menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.051 serta nilai signifikansi sebesar 0.000, lebih rendah dari 0.05 yang membuktikan bahwa rasio belanja berpengaruh positif signifikan terhadap *Human*

*Development Index*. Maknanya, belanja daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan belanja daerah melalui pemberdayaan sumber daya manusia mencerminkan kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan serta kemakmuran masyarakat. Salah satu faktor peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat yaitu adanya aktivitas ekonomi melalui belanja daerah sehingga terdapat penambahan jumlah keluaran barang dan/atau jasa serta peningkatan jumlah uang beredar dari sisi pembelanjaan oleh pemerintah daerah (Dwiwandari & Badera, 2018).

Selama periode anggaran 2018-2021, alokasi belanja operasi terhadap keseluruhan belanja daerah berada di nilai 81.55%. Hal ini diartikan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah menggunakan dana daerah untuk melakukan belanja rutin sebagai sumber pembiayaan daerah sesuai rencana alokasi anggaran, sehingga mampu menciptakan suatu aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *fiscal federalism* oleh Musgrave (1959) mengenai pengaruh porsi belanja daerah terhadap tingkat pendapatan daerah serta dampaknya pada *Human Development Index*.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian oleh Harliyani & Haryadi (2016) dan Dwiwandari & Badera (2018) yang menyampaikan adanya hubungan positif antara belanja daerah dengan *Human Development Index*.

#### **4.3.7 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Human Development Index***

Hipotesis ketujuh merumuskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap *Human Development Index*. Sesuai temuan pada tabel 4.11 memperlihatkan nilai koefisien -0.033 dan nilai signifikansi 0.0059, lebih rendah dari tingkat signifikansi 0.05 sehingga terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap *Human Development Index* pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Artinya, semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka mempengaruhi kenaikan angka *Human Development Index*.

Pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari nilai PDRB menggambarkan peningkatan pendapatan masyarakat yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong terwujudnya infrastruktur yang baik dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini masih terjadi ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi yang terlihat dari ketimpangan pendapatan, belum terpenuhinya kehidupan yang layak, serta sulit untuk memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik (Khadijah et al., 2022). Sehingga, belum optimalnya kegiatan usaha penunjang perkembangan ekonomi berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang tidak maksimal.

Selama tahun 2018-2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Secara umum, laju pertumbuhan stagnan di kisaran 5%, terkecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan hingga menyentuh angka -10.28%. Laju pertumbuhan yang fluktuatif berpengaruh pada pembangunan ekonomi khususnya HDI di periode tersebut. Hasil ini senada dengan Amelinda

(2022) dan Khadijah et al. (2022) yang membuktikan terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan *Human Development Index*.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian atas pengaruh kinerja keuangan terhadap *Human Development Index* melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018 hingga 2021 yang telah dilakukan melalui proses pengujian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan yang diinterpretasikan melalui rasio derajat desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi tingkat kesesuaian target dan realisasi anggaran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan rasio belanja berpengaruh negatif

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi alokasi belanja akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio belanja berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Human Development Index*. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal dan alokasi belanja daerah akan meningkatkan angka *Human Development Index* pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Sedangkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap *Human Development Index*. Ini bermakna bahwa tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap layanan publik yang lebih baik, sehingga *Human Development Index* tidak terpengaruh.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Human Development Index*. Maknanya, semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka akan mempengaruhi kenaikan angka *Human Development Index*. Aktivitas usaha penunjang perkembangan ekonomi yang belum optimal akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang tidak maksimal.
4. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu menjadi variabel mediasi antara kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap *Human Development Index*. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh kinerja

keuangan dalam bentuk rasio belanja terhadap *Human Development Index*, yang bermakna peningkatan alokasi belanja akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat *Human Development Index*.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018-2021. Keterbatasan lain dalam penelitian yaitu hanya menggunakan beberapa indikator kinerja keuangan sebagai variabel independen dalam mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan *Human Development Index*.

## 5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Beberapa faktor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

### 1. Pemerintah daerah wilayah Provinsi Jawa Tengah

Implementasi pelaksanaan desentralisasi oleh pemerintah daerah menunjukkan kenaikan dan secara efektif pengelolaan perolehan Pendapatan Asli Daerah telah sesuai target. Laju perekonomian daerah di Jawa Tengah juga secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19. Di sisi lain, pemerintah perlu memperhatikan kebijakan berkaitan dengan pengeluaran belanja untuk dialokasikan kepada

pembangunan publik sehingga terjadi pemerataan dalam kesejahteraan masyarakat.

## 2. Masyarakat wilayah Provinsi Jawa Tengah

Masyarakat kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah dapat ikut terlibat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah sehingga pemerintahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tujuan dapat tercapai.

### 5.4 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya mengacu pada kesimpulan yang telah dikemukakan antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber potensial daerah sehingga meningkatkan kontribusi penerimaan daerah. Selain itu, pemerintah sebaiknya memiliki kebijakan dalam mengatur proporsi yang ideal mengenai belanja pemerintah daerah, sehingga alokasi belanja dapat menunjang pembangunan untuk memakmurkan masyarakat.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan wilayah lain di Indonesia sebagai objek penelitian dengan kurun waktu yang lebih lama sehingga memiliki cakupan hasil yang lebih luas. Penelitian juga dapat memasukkan variabel lain yang mempengaruhi HDI, seperti rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, dan rasio lainnya untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

## DAFTAR PUSTAKA

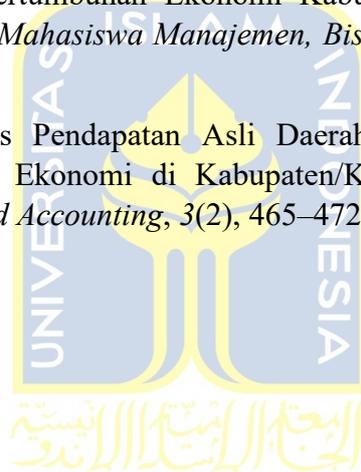
- Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Untuk: Ekonomi, Manajemen, Komunikasi, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Alexandri, M. B. (2022). Effect of Financial Performance on Economic Growth (District/City Case Study on Sumatera Island). *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1).
- Ali, M., Raza, S. A. A., Puah, C. H., & Samdani, S. (2021). How financial development and economic growth influence human capital in low-income countries. *International Journal of Social Economics*, 48(10), 1393–1407. <https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2020-0323>
- Amelinda, D. V. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM Kabupaten Tulungagung. *Journal of Economics*, 2(1), 159–174.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Azwandi, Wibisono, C., Indrawan, M. G., Satriawan, B., & Khaddafi, M. (2022). The Effect of Financial Performance on the Human Development Index Moderated Economic Growth in Regency/City in the Province of Riau Island. *International Journal of Educational Review*, 2(5), 633–650.
- Bahari, F., & Nugroho. (2019). Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 1–8.
- Bailusy, M. N. (2019). Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia: Mediasi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Multiparadigma*, 1(1), 55–69.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182.
- BPS. (2013). *Indeks Pembangunan Manusia*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021a). *BPS Provinsi Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1741/1/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- BPS. (2021b). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

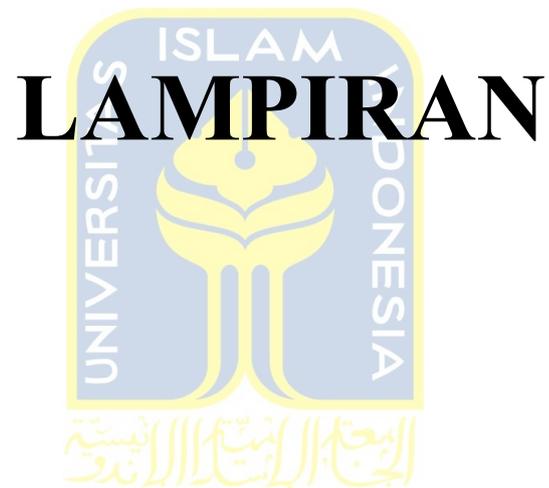
- BPS. (2021c). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- Caraka, R. E., & Yasin, H. (2017). *Spatial Data Panel*. Ponorogo: Wade Group.
- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187–210.
- Devas. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Dihni, V. A. (2022, August 8). *Ekonomi RI Masih Terpusat di Jawa pada Kuartal II 2022*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/08/ekonomi-ri-masih-terpusat-di-jawa-pada-kuartal-ii-2022>
- Dukcapil. (2022). *273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>
- Dwiyandari, L. D. Y., & Badera, I. D. N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 1741–1770. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p04>
- Fretes, P. N. de. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Edisi 7). Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gousario, F., & Dharmastuti, C. F. (2015). Regional Financial Performance and Human Development Index Based on Study in 20 Counties/Cities of Level I Region. *Journal The WINNERS*, 16(2), 152–165. [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)
- Habbe, A. H. (2021). The Exploration of Effect of Financial Performance to the Public Welfare. *International Journal of Law and Management*, 63(5), 464–478. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2017-0222>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Hamimah, H., & Zulkarnain, Z. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(2), 11–18.

- Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129–140. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i3.3514>
- Hay, T., Pudhihardjo, M., & Syafitri, W. (2017). Analysis of Regional Finance Performance on Economic Growth, Poverty and Unemployment in West Papua Province, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 6(66), 259–263. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-06.30>
- HDR. (2022). *Human Development Index*. <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- Indramawan, D. (2018). *The Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua*.
- Karenina, S., Andayani, K. D., Aditya, I. A., & Wasil, M. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 27–41.
- Kemenkeu, T. P. B. K. F. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khadijah, S., Saharuddin, Anwar, K., & Murtala. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 1(1), 74–82.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahroji, D. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1), 51–72. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masduki, U., Rindayati, W., & Mulatsih, S. (2022). How can quality regional spending reduce poverty and improve human development index? *Journal of Asian Economics*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101515>
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.

- Musliman. (2021). *IPM Jawa Tengah 2021 Bertengger di Angka 72,16* .  
<https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/12/09/ipm-jawa-tengah-2021-bertengger-di-angka-7216/>
- Prihastuti, A. H., Taufik, T., & Agusti, R. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *Jurnal SOROT*, 10(2), 143–154.
- Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, I. B. P., Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The Implications of Fiscal Decentralization and Budget Governance on Economic Capacity and Community Welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249.  
<https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>
- Puryatama, A. F., & Setyowati, K. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 3(1), 67–75.
- Riduwan, & Kuncoro, E. A. (2017). *Cara Mudah Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 116–122.
- Saputra, B. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(1), 96–111.
- Sari, F. N., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–6.
- SIMREG Bappenas. (2020). *Laju Pertumbuhan Ekonomi*.  
<https://simreg.bappenas.go.id/>
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2021). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal InFestasi*, 11(2), 118–136.
- Tandiayu, B., & Sombolayuk, W. (2021). The Influence of Financial Performance of The APBD on The Human Development Index (IPM) of Toraja Utara District (Perspective Post Expansion). *Journal of Management, E-Business & Entrepreneurship Research*, 1(1), 12–28. <http://www.autonomy>

- Utami, R. O. D., Indrawati, L. R., & Jalunggono, G. (2020). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2001-2018. *Directory Journal of Economic*, 2(1), 144–163.
- Welly, & Djuniar, L. (2017). Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 - 2015. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 1–21.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Winarni, E., Handayani, R., & Soleh, A. (2022). Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 270–276. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.369>
- Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 346–357.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 465–472.





**LAMPIRAN 1 Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah**

NO	NAMA PERUSAHAAN
1	Kabupaten Cilacap
2	Kabupaten Banyumas
3	Kabupaten Purbalingga
4	Kabupaten Banjarnegara
5	Kabupaten Kebumen
6	Kabupaten Purworejo
7	Kabupaten Wonosobo
8	Kabupaten Magelang
9	Kabupaten Boyolali
10	Kabupaten Klaten
11	Kabupaten Sukoharjo
12	Kabupaten Wonogiri
13	Kabupaten Karanganyar
14	Kabupaten Sragen
15	Kabupaten Grobogan
16	Kabupaten Blora
17	Kabupaten Rembang
18	Kabupaten Pati
19	Kabupaten Kudus
20	Kabupaten Jepara
21	Kabupaten Demak
22	Kabupaten Semarang
23	Kabupaten Temanggung
24	Kabupaten Kendal
25	Kabupaten Batang
26	Kabupaten Pekalongan
27	Kabupaten Pemasang
28	Kabupaten Tegal
29	Kabupaten Brebes
30	Kota Magelang
31	Kota Surakarta
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Pekalongan
35	Kota Tegal

**LAMPIRAN 2 Rekapitulasi Data Penelitian**

<b>Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Tahun</b>	<b>DES</b>	<b>EFE</b>	<b>BO</b>	<b>PE</b>	<b>HDI</b>
Kabupaten Banjarnegara	2018	11.38	118.66	73.37	5.67	66.54
	2019	11.13	111.16	79.22	5.60	67.34
	2020	12.15	90.60	76.00	-1.32	67.45
	2021	15.04	109.16	80.89	2.02	67.86
Kabupaten Banyumas	2018	19.85	110.57	80.83	6.45	71.30
	2019	18.57	107.90	82.89	6.32	71.96
	2020	20.45	91.55	83.59	-1.65	71.98
	2021	21.85	100.93	81.82	2.99	72.44
Kabupaten Batang	2018	13.96	102.00	88.29	5.72	67.86
	2019	13.28	104.51	85.19	5.39	68.42
	2020	13.39	104.47	86.50	-1.29	68.65
	2021	17.72	120.26	86.17	3.94	68.92
Kabupaten Blora	2018	9.58	105.96	71.46	4.38	67.95
	2019	8.99	123.43	74.31	4.05	68.65
	2020	12.10	112.35	79.70	-4.56	68.84
	2021	14.67	125.97	82.23	3.44	69.37
Kabupaten Boyolali	2018	15.39	118.06	73.17	5.72	73.22
	2019	14.35	119.22	73.41	5.96	73.80
	2020	15.47	122.25	75.84	-1.20	74.25
	2021	21.19	143.54	75.54	3.69	74.40
Kabupaten Brebes	2018	11.55	97.42	76.86	5.26	65.68
	2019	12.17	101.86	74.78	5.76	66.12
	2020	12.74	98.47	78.95	-0.47	66.11
	2021	16.40	125.50	81.84	1.39	66.32
Kabupaten Cilacap	2018	16.31	125.44	78.31	2.99	69.56
	2019	15.72	114.78	76.13	2.27	69.98
	2020	16.74	95.69	81.37	-10.28	69.95
	2021	22.17	105.23	78.97	0.84	70.42
Kabupaten Demak	2018	15.97	124.15	75.64	5.40	71.26
	2019	15.55	119.92	76.02	5.36	71.87
	2020	17.56	108.73	87.27	-0.23	72.22
	2021	18.81	111.18	85.26	1.63	72.57
Kabupaten Grobogan	2018	12.94	103.89	78.49	5.83	69.32
	2019	12.55	107.87	78.95	5.37	69.86
	2020	12.71	105.56	82.93	-1.57	69.87
	2021	16.10	131.26	84.91	3.07	70.41
Kabupaten Jepara	2018	16.37	113.57	79.64	5.85	71.38

	2019	15.56	106.97	83.11	6.02	71.88
	2020	16.98	103.94	85.15	-1.92	71.99
	2021	17.16	99.93	87.19	4.23	72.36
Kabupaten Karanganyar	2018	16.23	108.09	84.94	5.98	75.54
	2019	15.44	118.25	84.90	5.76	75.89
	2020	16.05	107.71	89.17	-1.87	75.86
	2021	19.70	119.95	88.80	2.60	75.99
Kabupaten Kebumen	2018	13.33	101.36	82.76	5.53	68.80
	2019	14.30	101.99	83.72	5.52	69.60
	2020	14.51	96.49	85.75	-1.45	69.81
	2021	16.67	133.18	87.71	2.55	70.05
Kabupaten Kendal	2018	15.70	100.71	84.13	5.77	71.28
	2019	17.72	84.64	85.39	5.71	71.97
	2020	18.19	83.88	86.44	-1.51	72.29
	2021	19.09	105.69	91.67	3.00	72.50
Kabupaten Klaten	2018	14.68	111.65	79.82	5.47	74.79
	2019	10.26	113.86	83.93	5.48	75.29
	2020	11.19	108.34	86.62	-1.17	75.56
	2021	12.27	126.60	88.56	3.07	76.12
Kabupaten Kudus	2018	16.90	105.74	78.04	3.24	74.58
	2019	18.89	106.20	84.58	3.09	74.94
	2020	20.92	101.37	81.71	-3.11	75.00
	2021	23.44	141.35	91.35	-2.46	75.16
Kabupaten Magelang	2018	14.12	91.77	74.32	5.28	69.11
	2019	16.38	97.56	79.49	5.30	69.87
	2020	15.49	81.20	81.57	-1.67	69.87
	2021	15.20	128.80	83.00	2.90	70.12
Kabupaten Pati	2018	13.96	119.71	79.25	5.71	70.71
	2019	11.95	111.53	81.22	5.81	71.35
	2020	12.63	105.64	86.33	-1.16	71.77
	2021	14.26	114.11	85.26	2.69	72.28
Kabupaten Pekalongan	2018	14.81	86.35	76.17	5.76	68.97
	2019	17.02	87.24	80.48	5.35	69.71
	2020	20.13	73.24	79.41	-1.89	69.63
	2021	16.68	72.24	87.48	2.41	70.11
Kabupaten Pemasang	2018	12.37	117.63	84.60	5.69	65.67
	2019	10.84	125.88	83.40	5.80	66.32
	2020	11.97	106.25	81.10	-0.61	66.32
	2021	14.03	142.64	90.63	3.07	66.56
Kabupaten Purbalingga	2018	14.51	110.19	83.04	5.42	68.41
	2019	12.97	114.68	84.58	5.64	68.99
	2020	13.90	110.43	85.82	-1.18	68.97

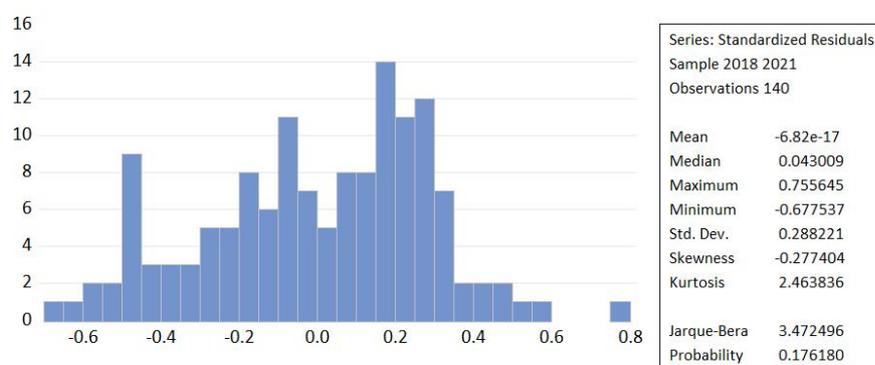
	2021	18.39	146.30	87.42	1.91	69.15
Kabupaten Purworejo	2018	13.60	107.36	78.22	5.33	71.87
	2019	13.01	99.10	80.53	5.44	72.50
	2020	14.21	93.33	80.65	-1.61	72.68
	2021	19.14	135.77	83.48	2.75	72.98
Kabupaten Rembang	2018	17.03	105.73	78.87	5.89	69.46
	2019	16.35	105.68	85.85	5.20	70.15
	2020	16.24	106.32	83.72	-1.49	70.02
	2021	21.14	129.83	86.70	3.37	70.43
Kabupaten Semarang	2018	18.11	105.93	78.32	5.67	73.61
	2019	17.19	112.78	80.16	5.39	74.14
	2020	20.32	92.22	85.84	-2.67	74.10
	2021	23.82	125.58	84.01	2.79	74.24
Kabupaten Sragen	2018	15.36	114.01	77.12	5.75	72.96
	2019	14.88	115.58	85.54	5.90	73.43
	2020	15.41	116.63	82.97	-1.81	73.95
	2021	22.99	174.66	88.15	2.81	74.08
Kabupaten Sukoharjo	2018	21.09	144.33	77.67	5.79	76.07
	2019	16.01	145.51	80.26	5.92	76.84
	2020	16.29	141.34	78.70	-1.70	76.98
	2021	24.93	153.99	83.82	3.20	77.13
Kabupaten Tegal	2018	14.75	93.09	80.16	5.51	67.33
	2019	14.92	104.59	80.35	5.56	68.24
	2020	15.68	97.60	82.36	-1.48	68.39
	2021	20.65	136.23	83.40	2.73	68.79
Kabupaten Temanggung	2018	14.56	104.49	86.00	5.13	68.83
	2019	13.55	111.47	84.71	5.05	69.56
	2020	13.89	115.20	88.27	-2.13	69.57
	2021	18.42	137.98	83.60	2.60	69.88
Kabupaten Wonogiri	2018	11.71	118.27	78.73	5.41	69.37
	2019	9.60	128.41	72.86	5.14	69.98
	2020	10.73	108.70	86.43	-1.41	70.25
	2021	10.48	93.44	73.70	2.53	70.49
Kabupaten Wonosobo	2018	12.25	110.21	75.48	5.06	67.81
	2019	11.18	112.97	74.58	5.57	68.27
	2020	11.61	112.02	81.03	-1.64	68.22
	2021	17.27	143.72	82.92	2.52	68.43
Kota Magelang	2018	27.52	114.72	74.65	5.46	78.31
	2019	24.40	97.56	72.65	5.41	78.80
	2020	27.72	114.01	82.52	-2.45	78.99
	2021	32.12	150.05	79.23	3.12	79.43
Kota Pekalongan	2018	19.80	94.27	83.19	5.69	74.24

	2019	21.82	87.24	80.82	5.50	74.77
	2020	22.22	105.44	80.15	-1.87	74.98
	2021	26.08	123.66	82.34	3.09	75.40
Kota Salatiga	2018	23.48	98.41	75.50	5.84	82.41
	2019	24.25	106.61	80.49	5.90	83.12
	2020	23.56	96.29	81.92	-1.68	83.14
	2021	29.66	118.25	86.36	2.48	83.60
Kota Semarang	2018	43.01	101.92	72.73	6.48	82.72
	2019	45.47	95.69	77.21	6.81	83.19
	2020	49.41	80.45	79.88	-1.85	83.05
	2021	49.47	93.85	79.39	4.92	83.55
Kota Surakarta	2018	27.95	116.37	72.54	5.75	81.46
	2019	27.81	100.23	72.97	5.78	81.86
	2020	19.15	80.73	78.60	-1.76	82.21
	2021	28.91	107.15	79.83	3.93	82.62
Kota Tegal	2018	27.86	93.09	87.59	5.87	74.44
	2019	28.52	95.94	84.13	5.77	74.93
	2020	29.39	80.05	85.56	-2.29	75.07
	2021	29.89	82.80	85.15	2.15	75.52

### LAMPIRAN 3 Hasil Analisis Deskriptif

	DES	EFE	BEL	PE	HDI
<b>Mean</b>	17.98205	110.3801	81.55208	2.911963	72.38629
<b>Median</b>	16.16604	107.9973	81.83000	3.811209	71.57500
<b>Maximum</b>	49.47117	174.6595	91.66657	6.810000	83.60000
<b>Minimum</b>	8.994211	72.23693	71.46020	-10.28000	65.67000
<b>Std. Dev.</b>	7.022926	17.07459	4.546139	3.236208	4.400833
<b>Skewness</b>	2.216794	0.636035	-0.202929	-0.998575	0.939585
<b>Kurtosis</b>	9.438098	3.997090	2.377617	3.522836	3.354188
<b>Jarque-Bera</b>	356.4505	15.23871	3.220475	24.86149	21.33094
<b>Probability</b>	0.000000	0.000491	0.199840	0.000004	0.000023
<b>Sum</b>	2517.487	15453.21	11417.29	407.6748	10134.08
<b>Sum Sq. Dev.</b>	6855.687	40524.29	2872.765	1455.752	2692.059
<b>Observations</b>	140	140	140	140	140

### LAMPIRAN 4 Hasil Uji Normalitas



### LAMPIRAN 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	77.26598	1250.958	NA
DES	0.001286	7.749745	1.019272
EFE	2.834130	1011.362	1.059183
BEL	0.003347	361.4679	1.111819
PE	0.006712	2.051462	1.129984

### LAMPIRAN 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.767401	5.479582	0.505039	0.6144
DES	0.030940	0.022352	1.384218	0.1686
EFE	0.109629	1.049453	0.104463	0.9170
BEL	-0.018584	0.036063	-0.515326	0.6072
PE	-0.026584	0.051072	-0.520520	0.6036

### LAMPIRAN 7 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.521647	Mean dependent var	-1.48E-14
Adjusted R-squared	0.500067	S.D. dependent var	2.897987
S.E. of regression	2.049049	Akaike info criterion	4.321336
Sum squared resid	558.4143	Schwarz criterion	4.468418
Log likelihood	-295.4935	Hannan-Quinn criter.	4.381106
F-statistic	24.17284	Durbin-Watson stat	2.032150
Prob(F-statistic)	0.000000		

### LAMPIRAN 8 Hasil Pengujian *Chow* untuk Model Struktural (1)

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.587099	(34,102)	0.0402
Cross-section Chi-square	59.448959	34	0.0044

### LAMPIRAN 9 Hasil Pengujian *Hausman* untuk Model Struktural (1)

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

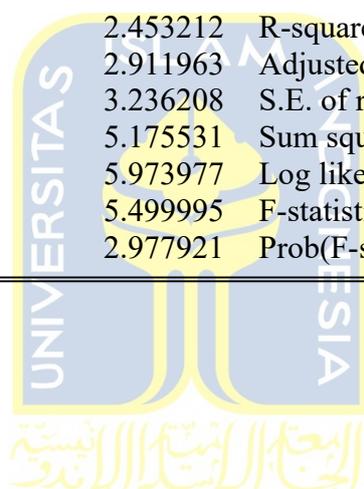
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	40.504232	3	0.0000

**LAMPIRAN 10 *Fixed Effect Model* Terpilih untuk Model Struktural (1)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-13.10457	13.32995	-0.983093	0.3279
DES (H <sub>1</sub> )	-0.236118	0.147090	-1.605258	0.1115
EFE (H <sub>2</sub> )	13.21150	2.743771	4.815087	0.0000
BEL (H <sub>3</sub> )	-0.511702	0.088633	-5.773243	0.0000

\*Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	2.453212	R-squared	0.421224
Mean dependent var	2.911963	Adjusted R-squared	0.211275
S.D. dependent var	3.236208	S.E. of regression	2.874081
Akaike info criterion	5.175531	Sum squared resid	842.5550
Schwarz criterion	5.973977	Log likelihood	-324.2872
Hannan-Quinn criter.	5.499995	F-statistic	2.006322
Durbin-Watson stat	2.977921	Prob(F-statistic)	0.003267



### LAMPIRAN 11 Hasil Pengujian *Chow* untuk Model Struktural (2)

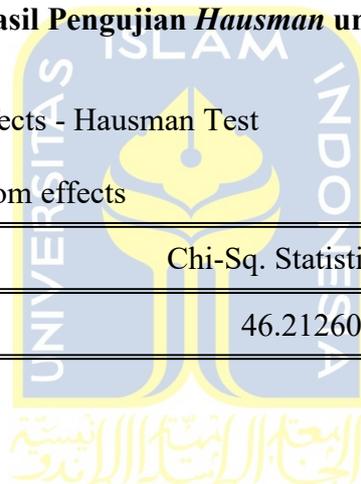
Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	297.349876	(34,101)	0.0000
Cross-section Chi-square	646.252618	34	0.0000

### LAMPIRAN 12 Hasil Pengujian *Hausman* untuk Model Struktural (2)

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	46.212609	4	0.0000



**LAMPIRAN 13 *Fixed Effect Model* Terpilih untuk Model Struktural (2)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.55715	1.575611	41.60744	0.0000
DES (H <sub>4</sub> )	0.036351	0.017522	2.074661	0.0406
EFE (H <sub>5</sub> )	0.448995	0.357599	1.255582	0.2122
BEL (H <sub>6</sub> )	0.051061	0.012011	4.251305	0.0000
PE (H <sub>7</sub> )	-0.032799	0.011649	-2.815721	0.0059

\*Dependent Variable: *Human Development Index*

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.287189	R-squared	0.995711
Mean dependent var	72.38629	Adjusted R-squared	0.994097
S.D. dependent var	4.400833	S.E. of regression	0.338121
Akaike info criterion	0.899794	Sum squared resid	11.54689
Schwarz criterion	1.719251	Log likelihood	-23.98557
Hannan-Quinn criter.	1.232797	F-statistic	617.0075
Durbin-Watson stat	2.516680	Prob(F-statistic)	0.000000

## LAMPIRAN 14 Diagram Jalur

